



LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM
PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
SOSIAL

PEMBIMBING :
Dra. Atirista Nainggolan, MP

Oleh:
Bunga Nuri Lestari
NRP. 20.03.007

POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL
BANDUNG
2023

LEMBAR PENGESAHAN

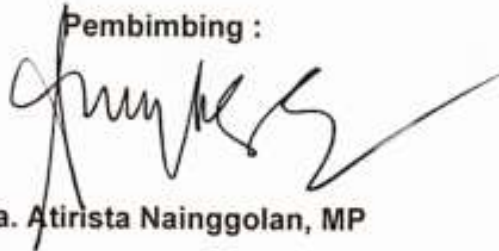
Judul : LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM PROGRAM
STUDI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
SOSIAL

Nama Mahasiswa : Bunga Nuri Lestari

NRP : 20.03.007

Program : Program Studi Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial
Program Studi Sarjana Terapan

Pembimbing :



Dra. Atirista Nainggolan, MP

Mengetahui :

Ketua Program Studi Perlindungan Dan Pemberdayaan
Program Sarjana Terapan
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung



Lina Favourita, S. Ph.D

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan akhir praktikum laboratorium program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dapat diselesaikan secara tepat waktu. Penulisan laporan akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat pelaksanaan praktikum laboratorium. Selain itu laporan akhir dapat bermanfaat bagi para pembaca maupun peneliti dalam memberikan wawasan baru terutama dalam hal perlindungan dan pemberdayaan sosial.

Laporan ini disusun dari hasil kegiatan praktikum laboratorium yang dimulai pada tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2023 yang berisi proses kegiatan praktikum dari tahap inisiasi sosial sampai dengan penyusunan rencana intervensi sesuai dengan 5 profil program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial yaitu analisis jaminan sosial, analisis sumber daya bantuan sosial, analisis pemberdayaan sosial, analisis penataan lingkungan sosial, serta analisis penanggulangan bencana.

Selesai penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan doa berbagai pihak. Pada kesempatan ini, praktikan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Marjuki, M.Sc. selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
2. Lina Favourita, Ph.D selaku Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang sudah memberikan arahan dan masukan demi kelancaran kegiatan praktikum.
3. Dra. Atirista Nainggolan, MP selaku Kepala Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang sekaligus selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada praktikan selama pelaksanaan praktikum laboratorium dan penyusunan laporan.
4. Kedua orang tua dan Sahabat yang selalu memberikan dukungan dalam segala hal, serta Monalisa sebagai support system dan penyemangat saya terimakasih sudah mendampingi dan memberikan doa terbaik untuk saya.
5. Rekan-rekan anggota kelompok 12 yang senantiasa memberikan motivasi selama pelaksanaan praktikum laboratorium.
6. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama pelaksanaan praktikum laboratorium.

Praktikan menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan laporan praktikum laboratorium kali ini. Oleh sebab itu, dimohon kepada pembaca agar

dapat memberikan saran serta masukan dalam rangka adanya perbaikan guna penyusunan laporan praktikum selanjutnya.

Praktikan berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca umumnya dan bagi praktikan khususnya. Atas bantuan dan bimbingan dari segala pihak, praktikan ucapkan terimakasih.

Bandung, 9 Februari 2023

Praktikan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Praktikum	1
1.3 Waktu Dan Lokasi Praktikum	3
1.4 Proses Praktikum.....	3
1) Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial	5
2) Peningkatan Kompetensi Analis Sumber Dana Bantuan Sosial.....	6
3) Peningkatan Kompetensi Analis Pemberdayaan Sosial	8
4) Peningkatan Kompetensi Analis Penata Lingkungan Sosial.....	9
5) Peningkatan Kompetensi Analis Penanggulangan Bencana	11
1.5 Sistematika Laporan	12
BAB II.....	14
PRAKTIKUM LABORATORIUM.....	14
2.1 Profil Analisis Jaminan Sosial	14
2.1.1 Gambaran Umum Masalah	14
2.1.2 Tinjauan Konsep Teori yang Relevan.....	16
2.1.3 Assesmen.....	19
a. Identifikasi Masalah	19
b. Identifikasi Kebutuhan	25
c. Identifikasi Potensi dan Sumber	26
2.1.4 Rencana Intervensi	27
a. Latar Belakang	27
b. Tujuan Umun dan Khusus	27
c. Bentuk Kegiatan Program	28

d.	Sistem Partisipan	29
e.	Metode Dan Teknik.....	30
f.	Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan.....	31
g.	Analisis Program Kelayakan SWOT	32
h.	Jadwal dan Langkah Langkah	33
2.2	Profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial	34
2.2.1	Gambaran Umum Masalah	35
2.2.2	Tujuan Konsep/Teori yang Relevan.....	36
2.2.3	Assesmen.....	41
a.	Identifikasi masalah.....	41
b.	Identifikasi Kebutuhan	44
c.	Identifikasi Sistem Sumber.....	44
2.2.4	Rencana Intervensi	45
a.	Latar Belakang	45
b.	Tujuan Umum dan Khusus	45
c.	Bentuk kegiatan dan program	46
d.	Sistem Partisipan	46
e.	Metode dan Teknik.....	47
f.	Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan.....	48
g.	Analisis kelayakan program SWOT	49
h.	Jadwal dan Langkah langkah.....	50
2.3	Profil Analis Pemberdayaan Sosial	51
2.3.1	Gambaran Umum Masalah	51
2.3.2	Tinjauan Konsep/Teori yang Relevan.....	52
2.3.3	Assesment	57
a.	Identifikasi Masalah	57
b.	Identifikasi Kebutuhan	61
c.	Identifikasi Potensi dan Sumber	62
2.3.4	Rencana Intervensi	62
a.	Latar Belakang	62
b.	Tujuan umum dan khusus.....	63
c.	Bentuk Kegiatan dan Program.....	63
d.	Sistem Partisipan	63

e.	Metode dan Teknik.....	64
f.	Analisis kelayakan program SWOT	65
g.	Jadwal dan Langkah langkah.....	66
2.4	Profil Analis Penataan Lingkungan Sosial	67
2.4.1	Gambaran Masalah.....	67
2.4.2	Tinjauan Konsep / Teori yang Relevan.....	67
2.4.3	Assesmen.....	72
a.	Identifikasi Masalah	72
b.	Identifikasi Potensi dan Sumber	76
2.4.4	Rencana Intervensi	76
a.	Latar Belakang	76
b.	Tujuan umum dan khusus.....	77
c.	Bentuk Kegiatan dan Program.....	77
d.	Sistem Partisipan	77
e.	Metode dan Teknik.....	78
f.	Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan.....	78
g.	Analisis kelayakan program	79
h.	Jadwal dan langkah langkah	80
2.5	Profil Analis Penanggulangan Bencana.....	82
2.5.1	Gambaran Umum masalah.....	82
2.5.2	Tinjauan Konsep/Teori yang Relevan.....	84
2.5.3	Assesmen.....	85
a.	Identifikasi Masalah	85
b.	Identifikasi Kebutuhan	88
c.	Identifikasi Sistem Sumber.....	88
2.5.4	Rencana Intervensi	89
a.	Latar Belakang	89
b.	Tujuan Umum dan Tujuan Khusus.....	90
c.	Bentuk Kegiatan dan Program.....	91
d.	Sistem Partisipan	92
e.	Metode dan Teknik.....	92
f.	Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dubutuhkan.....	93
g.	Analisis Kelayakan Program	94

h. Jadwal dan langkah langkah	95
BAB III	97
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
1. Untuk Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial	98
2. Untuk Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 RAB Analis Jaminan Sosial.....	31
Tabel 2. 2 Analisis SWOT Analis Jaminan Sosial.....	32
Tabel 2. 3 Jadwal Analis Jaminan Sosial	33
Tabel 2. 4 Rundown Acara Analis Jaminan Sosial	34
Tabel 2. 5 RAB Analis Sumber Dana Bansos.....	48
Tabel 2. 6 Analisis SWOT Analis Sumber Dana Bansos	49
Tabel 2. 7 Jadwal Analis Sumber Dana Bansos.....	50
Tabel 2. 8 Rundown Analis Sumber Dana Bansos	51
Tabel 2. 9 Sistem Partisipan Analis Pemberdayaan Sosial	63
Tabel 2. 10 RAB Analis Pemberdayaan Sosial.....	64
Tabel 2. 11 Analisis SWOT Analis Pemberdayaan Sosial	65
Tabel 2. 12 Jadwal Analis Pemberdayaan Sosial.....	66
Tabel 2. 13 Langkah-Langkah Analis Pemberdayaan Sosial.....	66
Tabel 2. 14 Sistem Partisipan Analis Penataan Lingkungan.....	77
Tabel 2. 15 RAB Analis Penataan Lingkungan	78
Tabel 2. 16 Analisis SWOT Analis Penataan Lingkungan	79
Tabel 2. 17 Jadwal Analis Penatan Lingkungan	80
Tabel 2. 18 Rundown Acara Analis Penataan Lingkungan	81
Tabel 2. 19 Sistem Partisipan Analis Penanggulangan Bencana	92
Tabel 2. 20 RAB Analis Penanggulangan Bencana.....	93
Tabel 2. 21 Analisis SWOT Analis Penanggulangan Bencana.....	94
Tabel 2. 22 Rundown Acara Analis Penanggulangan Bencana	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bimbingan Pra Lapangan Oleh Dosen Pembimbing.....	4
Gambar 1. 2 Pelepasan Poltekesos Bandung	4
Gambar 1. 3 Penyerahan Kepada Pihak Desa Cingcin	4
Gambar 1. 4 Pembekalan Profil Analis Jamninan Sosial.....	5
Gambar 1. 5 Pembekalan Profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial.....	7
Gambar 1. 6 Pembekalan Profil Analis Pemberdayaan Sosial	8
Gambar 1. 7 Pembekalan Profil Analis Penataan Lingkungan Sosial	10
Gambar 1. 8 Pembekalan Profil Analis Penanggulangan Bencana.....	11
Gambar 1. 9 Pohon Masalah Analis Jaminan Sosial.....	23
Gambar 2 KPM KIP.....	25
Gambar 3 Wawancara dengan KPM KIP	25
Gambar 4 Pohon Masalah Analis Sumber Dana Bansos	42
Gambar 5 Pohon Masalah Analis Pemberdayaan Sosial	59
Gambar 6 Pohon Masalah Analis Penataan Lingkungan	73
Gambar 7 Observasi Lapangan	74
Gambar 8 Penumpukan Sampah	75
Gambar 9 Sampah di Lapangan	75
Gambar 10 Pohon Masalah Analis Penanggulangan Bencana	86
Gambar 11 Bimbingan Akhir Laporan	100
Gambar 12 Bimbingan Akhir sebelum Persidangan.....	100
Gambar 13 Lokakarya hasil praktikum.....	100
Gambar 14 Lokakarya.....	100
Gambar 15 Tim Desa Cingcin.....	100
Gambar 16 Bimbingan Praktikum	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politeknik Kesejahteraan Sosial merupakan lembaga perguruan tinggi kedinasan dibawah naungan Kementrian Sosial Republik Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan dengan tiga jenis program studi untuk sarjana terapan yaitu Pekerjaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Pendidikan sarjana terapan (D-IV) atau setara dengan S1 lebih di fokuskan pada praktik dengan perbandingan 40% teori dan 60% praktik. Kegiatan praktik ini dapat dilakukan melalui kegaitan praktikum. Praktikum menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu dan keterampilan dalam merespon fenomena sosial yang berada di sekitarnya.

Kegiatan praktik di lapangan untuk Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung mulai dilakukan pada semester VI yaitu praktikum laboratorium. Praktikum ini dilakukan secara luring dengan menggunakan data primer. Kegiatan praktikum laboratorium berfokus pada pembentukan profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yaitu sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana. Praktikum laboratorium ini menggunakan data primer dan sekunder. Praktikum dimulai pada 8 Februari 2023 hingga 15 April 2023. Praktikan mencari isu sesuai dengan profil yang telah ditentukan, kemudian melakukan asesmen dengan memperhatikan permasalahan, kebutuhan dan potensi yang tersedia. Setelah asesmen, praktikan dapat merancang suatu intervensi untuk menindaklanjuti adanya permasalahan tersebut, Praktikan dapat menggunakan metode, teknik, dan teknologi yang sudah dipelajari untuk melakukan analisis.

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktikum

a. Tujuan Praktikum

Praktikum laboratorium bertujuan agar mahasiswa memiliki :

1. Sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, perbedaan agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinil orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

2. Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
 3. Kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial
 4. Kemampuan untuk mempraktikkan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
 5. Memiliki keterampilan dalam melakukan proses intervensi pekerjaan sosial meliputi tahapan :
 - a) Pendekatan Awal
 - b) Asesmen
 - c) Perencanaan Intervensi
- b. Manfaat Praktikum

Bagi Mahasiswa :

1. Terbentuknya sikap mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasar agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinal orang lain. memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan, taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri, menginternalisasi semangat kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan
2. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
3. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
4. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mempraktikkan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
5. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya secara nyata dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
6. Mahasiswa memiliki keterampilan dalam proses intervensi pekerjaan sosial meliputi tahapan :
 - a) Pendekatan awal
 - b) Asesmen
 - c) Perencanaan Intervensi
 - d) Intervensi
 - e) Evaluasi, rujukan, dan terminasi

Bagi Lembaga :

1. Meningkatkan kualitas kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
2. Sebagai alat evaluasi untuk perbaikan kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

1.3 Waktu Dan Lokasi Praktikum

Lokasi praktikum di desa atau kelurahan tempat tinggal masing-masing praktikan. Waktu pelaksanaan Praktikum Laboratorium sesuai dengan tahapan proses terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu :

1. Pra Lapangan
 - a. Pembekalan : 25 Januari 2023 - 2 Februari 2023
 - b. Pelepasan Praktikan : 8 Februari 2023
2. Lapangan (Indoor) : 8 Februari - 15 April 2023
3. Pasca Lapangan :
 - a. Bimbingan penulisan laporan : 16 - 26 April 2023
 - b. Pendaftaran ujian : 27 – 29 April 2023
 - c. Ujian Lisan Praktikum : 2-3 Mei 2023
 - d. Perbaikan dan penyerahan Laporan : 4 – 10 Mei 2023

1.4 Proses Praktikum

Proses praktikum laboratorium dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengakhiran.

A. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap pra lapangan yang dilaksanakan untuk menyiapkan praktikan dan dosen pembimbing praktikum dalam memahami kegiatan praktikum laboratorium. Tahap pra lapangan terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pembekalan Umum
Pembekalan umum dilaksanakan dengan pemberian materi tentang perlindungan dan jaminan sosial oleh ibu Gayatri Widitra Nirwesti, ME selaku Perencana Ahli Muda Direktorat Kependudukan Dan Jaminan Sosial, Bappenas
2. Bimbingan pra lapangan oleh dosen pembimbing praktikum :
 - a. Review tentang materi pembekalan umum dan penugasan
 - b. Bimbingan teori/konsep dan keterampilan yang akan diterapkan



Gambar 1. 1 Bimbingan Pra Lapangan Oleh Dosen Pembimbing

3. Pelepasan dan Penyerahan ke Desa

Pada Rabu, 8 Februari 2023 dilaksanakan kegiatan pelepasan Praktikum Laboratorium untuk seluruh mahasiswa angkatan tahun 2020. Seluruh mahasiswa di setiap prodi mengikuti pelaksanaan kegiatan tersebut di depan gedung rektorat Poltekesos Bandung.



Gambar 1. 2 Pelepasan Oleh Lembaga di Depan Gedung Rektorat Poltekesos Bandung



Gambar 1. 3 Penyerahan Kepada Pihak Desa Cingcin

B. Tahap Lapangan

Tahap lapangan dilaksanakan dalam lima sesi sesuai profil lulusan Prodi Lindayasos yaitu praktik sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana Setiap sesi dilaksanakan selama 14 hari kalender, dengan rician kegiatan sebagai berikut:

1) Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial

- a. Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial oleh Gayatri Waditra Nirwesti, S.Mn, MSE selaku Perencana Ahli Muda Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial, Bappenas yang dilaksanakan pada Kamis, 2 Februari 2023. Membahas tentang Jaminan Sosial bagi Pekerja Sektor Informal di Indonesia, yang meliputi:
 1. Berbagai isu dalam implementasi jaminan sosial
 2. Kebijakan dan struktur jaminan sosial
 3. Program jaminan sosial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.
 4. Kelembagaan utama penyelenggaraan jaminan sistem jaminan sosial.
 5. Strategi dan target jaminan sosial dalam RKP 2023.
 6. Karakteristik masyarakat yang menerima bantuan sosial di sektor formal dan informal.
 7. Tantangan program jaminan sosial di Indonesia: Pekerja informal di Indonesia.
 8. Model jaminan sosial yang digunakan
 9. Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan jaminan sosial
 10. Merancang program jaminan sosial
 11. Melakukan analisis kelayakan rancangan program jaminan sosial
 12. Stakeholder terkait program jaminan sosial.



Gambar 1. 4 Pembekalan Profil Analis Jaminan Sosial

- b. Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Jaminan Sosial, sebagai berikut:

1. Pengetahuan
 - a) Mengetahui konsep teoritis kebutuhan dasar manusia.
 - b) Memahami konsep masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial.
 - c) Mengetahui konsep perlindungan dan jaminan sosial.
 - d) Mengetahui konsep standar praktik pekerjaan sosial.
2. Keterampilan
 - a) Mampu melaksanakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
 - b) Mampu menganalisis dan menyusun program perlindungan dan jaminan sosial untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal
 - c) Mampu menganalisis dan menyusun program bantuan sosial
 - d) Mampu menganalisis dan menyusun program advokasi sosial
 - e) Mampu menganalisis dan menyusun program pemberian akses bantuan hukum
- c. Praktik Jaminan Sosial:
 1. Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah dalam pelaksanaan Jaminan Sosial.
 2. Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder.
 3. Menyusun Rencana Intervensi sesuai dengan kasus/permasalahan yang dipilih oleh praktikan.
 4. Menyusun laporan praktik analisis jaminan sosial

2) Peningkatan Kompetensi Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

- a. Peningkatan Kompetensi Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh Tonton Heriyanto selaku CSR Manager PT.AAPC Indonesia yang dilaksanakan pada Rabu, 22 Februari 2023. Membahas tentang Peningkatan Kompetensi Analisis Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial, yang meliputi:
 1. Berbagai isu dalam implementasi sumber dana bantuan sosial,
 2. Model sumber dana bantuan sosial, yang digunakan
 3. Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan sumber dana bantuan sosial,
 4. Merancang program sumber dana bantuan sosial,
 5. Melakukan analisis kelayakan rancangan program sumber dana bantuan sosial,
 6. Stakeholder terkait program sumber dana bantuan sosial.
 7. Dimensi tujuan pembangunan berkelanjutan
 8. Manajemen sumber dana bantuan sosial
 9. Komponen dalam membangun jaringan



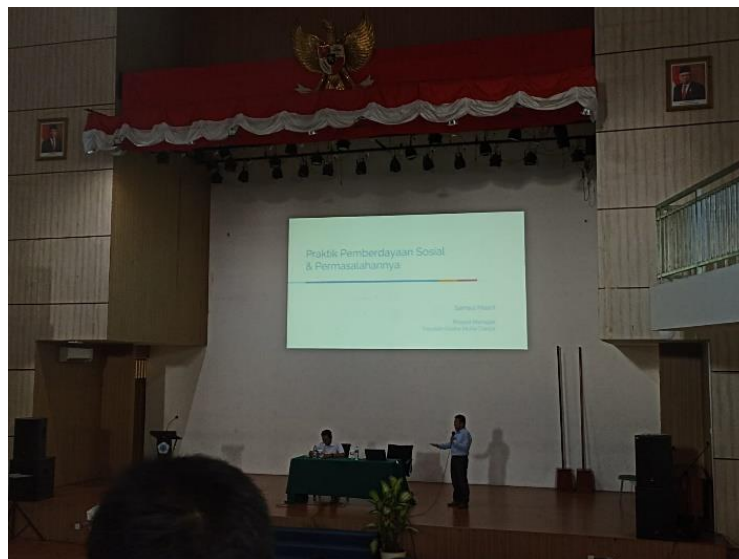
Gambar 1.5 Pembekalan Profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

- b. Peningkatan Kompetensi Analis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh dosen Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, sebagai berikut:
 - 1) Pengetahuan
 1. Menguasai konsep bantuan sosial dan jenisnya
 2. Menguasai konsep sumber dana bantuan sosial
 3. Menguasai konsep penggalangan dana dan prinsip-prinsip penggalangan dana bantuan sosial
 4. Menguasai konsep perencanaan dalam penggalangan sumber dana bantuan sosial
 5. Menguasai konsep pelaksanaan dan kebijakan penggalangan sumber dana bantuan sosial
 6. Menguasai konsep monitoring dan evaluasi dalam penggalangan sumber dana bantuan sosial
 - 2) Keterampilan
 1. Mampu menganalisis dan menyusun program perencanaan dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial
 2. Mampu dalam menganalisis dan menyusun program pelaksanaan dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial
 3. Mampu menganalisis dan menyusun program monitoring dan evaluasi dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial
 4. Mampu menganalisis dan menyusun sistem pelaporan dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial
 5. Mampu menganalisis dan menyusun sistem informasi dan komunikasi dalam penggalangan dana pengelolaan dana bantuan sosial

- c. Praktik Sumber Dana Bantuan Sosial:
1. Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah dalam pelaksanaan Sumber dana bantuan sosial
 2. Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder.
 3. Menyusun Rencana Intervensi sesuai dengan kasus/permasalahan yang dipilih oleh praktikan.
 4. Menyusun laporan praktik analisis sumber dana bantuan sosial

3) Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial

- a. Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial oleh Samsul Maarif selaku Projek Manajer Yayasan Usaha Mulia Kab. Cianjur yang dilaksanakan pada Rabu, 8 Maret 2023. Membahas tentang Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial yang meliputi:
1. Berbagai isu dan implementasi pemberdayaan sosial
 2. Model pemberdayaan sosial yang digunakan
 3. Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pemberdayaan sosial
 4. Merancang program pemberdayaan sosial
 5. Melakukan analisis kelayakan rancangan program pemberdayaan sosial
 6. Stakeholder terkait program pemberdayaan sosial



Gambar 1. 6 Pembekalan Profil Analisis Pemberdayaan Sosial

- b. Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial oleh dosen Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analisis Pemberdayaan Sosial, sebagai berikut:
- 1) Pengetahuan
 1. Menguasai konsep kebutuhan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam pemberdayaan sosial

2. Menguasai konsep dan teknologi pemberdayaan sosial
3. Menguasai konsep sumber daya penyelenggaraan sosial dalam pemberdayaan sosial
4. Menguasai konsep supervisi dalam program pemberdayaan sosial
5. Menguasai konsep pendampingan sosial dan penguatan kelembagaan sosial dalam pemberdayaan sosial
6. Menguasai konsep keserasian sosial dan pemasaran hasil usaha dalam pemberdayaan sosial

2) Keterampilan

1. Mampu mengidentifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan dalam pemberdayaan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat
2. Mampu menganalisis dan menyusun program penumbuhan kesadaran dan pemberian motivasi dalam pemberdayaan sosial
3. Mampu menganalisis dan menyusun program pemberian keterampilan dalam pemberdayaan sosial
4. Mampu menganalisis dan menyusun program penguatan kelembagaan dalam masyarakat dalam pemberdayaan sosial
5. Mampu melaksanakan program pendampingan sosial untuk pemberdayaan sosial
6. Mampu menganalisis dan menyusun program kemitraan dan penggalangan dana untuk pemberdayaan sosial
7. Mampu melaksanakan pemberian akses terhadap stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha
8. Mampu melaksanakan peningkatan akses pemasaran hasil usaha
9. Mampu melaksanakan supervisi dan advokasi sosial dalam pemberdayaan sosial
10. Mampu menganalisis dan menyusun program keserasian sosial dan bimbingan lanjut dalam pemberdayaan sosial

c. Praktik Analisis Pemberdayaan Sosial, meliputi :

1. Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder
2. Menyusun Rencana Intervensi
3. Menyusun laporan praktik analisis pemberdayaan sosial

4) Peningkatan Kompetensi Analisis Penata Lingkungan Sosial

- a. Peningkatan Kompetensi Analisis Penata Lingkungan Sosial oleh Ade Reno, AKS, MSW selaku Deputy 1 CEO, Islamic Relief Indonesia yang dilaksanakan pada Kamis, 23 Maret 2023. Membahas tentang Peningkatan Kompetensi Analisis Penataan Lingkungan Sosial, yang meliputi:
 1. Berbagai isu dalam mengelola penataan lingkungan sosial
 2. Model penataan lingkungan sosial yang digunakan
 3. Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam penataan lingkungan sosial

4. Merancang program penataan lingkungan sosial
5. Melakukan analisis kelayakan rancangan program penataan lingkungan sosial
6. Stakeholder terkait program Penataan Lingkungan Sosial



Gambar 1. 7 Pembekalan Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial

- b. Peningkatan Kompetensi Analisis Penataan Lingkungan Sosial oleh dosen Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial, sebagai berikut:
 - 1) Pengetahuan
 1. Menguasai Konsep ekologi manusia dalam lingkungan sosial
 2. Menguasai Konsep krisis lingkungan, konflik sosial, dan urbanisasi
 3. Menguasai Konsep degradasi lingkungan dan bencana alam
 4. Menguasai Konsep adaptasi ekologi manusia
 5. Menguasai Konsep interaksisosial-ekologi dalam suatu sistem sosial komunitas dan ekosistem
 6. Menguasai Konsep kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam
 7. Menguasai Konsep praktik pekerjaan sosial dalam penataan lingkungan sosial
 - 2) Keterampilan
 1. Mampu menganalisis hubungan permasalahan lingkungan dengan munculnya masalah sosial
 2. Mampu menganalisis dan menyusun program pengembangan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam
 3. Mampu menganalisis dan menyusun program penataan lingkungan sosial dalam peningkatan keberfungsian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat

- c. Praktik Analis Penataan Lingkungan Sosial
 1. Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah dalam pelaksanaan Penataan Lingkungan sosial
 2. Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder.
 3. Menyusun Rencana Intervensi sesuai dengan kasus/permasalahan yang dipilih oleh praktikan
 4. Menyusun laporan praktik analis penataan lingkungan sosial

5) Peningkatan Kompetensi Analis Penanggulangan Bencana

- a. Peningkatan Kompetensi Analis Penanggulangan Bencana oleh Mohd Robi Amri selaku Perencana Ahli Madya BNPB Jakarta yang dilaksanakan pada Rabu, 5 April 2023. Membahas tentang Peningkatan Kompetensi Analis Penanggulangan Bencana yang meliputi:
 1. Berbagai isu dalam penanggulangan bencana
 2. Model penanggulangan bencana yang digunakan
 3. Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam penanggulangan bencana
 4. Merancang program penanggulangan bencana
 5. Melakukan analisis kelayakan rancangan program penanggulangan bencana
 6. Stakeholder terkait program penanggulangan bencana



Gambar 1. 8 Pembekalan Profil Analis Penanggulangan Bencana

- b. Peningkatan Kompetensi Analis Penanggulangan Bencana oleh dosen Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Penanggulangan Bencana, sebagai berikut:
 - 1) Pengetahuan
 1. Menguasai Konsep bencana alam dan non alam serta jenis-jenisnya

2. Menguasai Konsep masalah bencana dan sistem penanggulangan bencana
 3. Menguasai Konsep mitigasi bencana, dan pengurangan risiko bencana.
 4. Menguasai Konsep perlindungan korban bencana pada saat status darurat bencana
 5. Menguasai Konsep standar minimum pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
- 2) Keterampilan
1. Mampu melaksanakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk pengurangan risiko bencana
 2. Mampu menganalisis dan menyusun program perlindungan korban pada saat status darurat bencana
 3. Mampu menganalisis pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan pengungsi
 4. Mampu menganalisis dan menyusun program pemberdayaan korban bencana pasca bencana
 5. Mampu menganalisis dan menyusun program pengembangan masyarakat resilien terhadap bencana
- c. Praktik Analisis Penanggulangan Bencana, meliputi:
1. Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/ masalah-masalah dalam penanggulangan bencana
 2. Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder
 3. Menyusun Rencana Intervensi
 4. Menyusun laporan praktik penanggulangan bencana
- C. Tahap Pasca Lapangan

Tahap pasca lapangan merupakan tahap pengakhiran dalam Praktikum Laboratorium. Dalam tahap ini terdapat finalisasi penyusunan laporan akhir praktikum, ujian lisan praktikum, serta perbaikan dan penyerahan laporan. Dimana mahasiswa akan mempresentasikan hasil praktikum selama di lapangan sebagai bentuk pertanggungjawaban praktikan dalam menerapkan teknologi pekerjaan sosial di lapangan.

1.5 Sistematika Laporan

Output dari kegiatan Praktikum Laboratorium ini adalah berupa laporan akhir praktikum. Laporan akhir praktikum dibuat dan diperiksa pada setiap tahap perkembangan praktikum yang mengacu pada kolom hasil-hasil yang diharapkan pada bagian tugas praktikan.

Berikut ini sistematika laporan akhir individu Praktikum Laboratorium Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Tahun 2023 dimana sistematika laporan ini akan digunakan oleh praktikan sebagai panduan dalam menyusun laporan akhir praktikum

- a. **BAB I Pendahuluan**, yang berisikan tentang latar belakang, tujuan dan manfaat praktikum, waktu dan lokasi praktikum, proses praktikum dan sistematika laporan
- b. **BAB II Praktikum laboratorium**, yang berisikan tentang gambaran umum masalah, tinjauan konsep / teori, asesmen, dan rencana intervensi dari lima profil lulusan yaitu Analisis Jaminan Sosial, Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analisis Pemberdayaan Sosial, Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analisis Penanggulangan Bencana
- c. **BAB III Kesimpulan dan Rekomendasi**, kepada program studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial serta Politeknik Kesejahteraan Sosial

BAB II

PRAKTIKUM LABORATORIUM

2.1 Profil Analisis Jaminan Sosial

Pada profil analisis jaminan sosial, praktikan memilih isu mengenai Belum tepatnya pemanfaatan dana KIP oleh penerima manfaat di desa Cingcin. Dalam menyusun laporan praktikan pada profil analisis jaminan sosial, praktikan menggunakan metode wawancara dan observasi yaitu dengan mengumpulkan data primer maupun sekunder.

2.1.1 Gambaran Umum Masalah

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu yang dijadikan prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan, seperti: ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Hal ini mengakibatkan pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu pemerintah wajib bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Semua warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, namun belum semua warga negara Indonesia mampu mengakses pendidikan sehingga tujuan pemerintah dalam penyelenggaraan wajib belajar belum sepenuhnya tercapai. Faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah masalah kemiskinan yang menjauhkan masyarakat dalam menjangkau pendidikan. Kemiskinan dan pendidikan adalah dua aspek yang memiliki kaitan sangat erat apabila digabungkan dengan kesejahteraan yang ada di masyarakat (Herlina, 2017). Kemiskinan menyebabkan terbatasnya masyarakat untuk mengakses pendidikan, sedangkan pendidikan bertujuan untuk membantu masyarakat keluar dari jeratan kemiskinan yang mereka hadapi. Kemiskinan inilah yang menjadi salah satu penyebab pemerataan pendidikan kurang terlaksana dan sebagai salah satu isu masalah pendidikan di Indonesia.

Pasal 34 UUD 1945 telah menjamin bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Kalimat tersebut jika kita kaji pada tataran empiris sehari-hari hanyalah sebuah cita-cita yang tidak tahu sampai kapan akan merata sampai pada lapisan masyarakat paling bawah khususnya masyarakat miskin. Upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan

Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu salah satunya melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program tersebut diharapkan dapat membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak ditemukan kasus siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena kesulitan biaya.

Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai dari pemerintah kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai kelanjutan dari Program Bantuan Siswa Miskin. Kartu Indonesia Pintar kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan tujuan menjamin seluruh anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan.

Pada hari Kamis, 23 Februari 2022 praktikan menemui pihak kelurahan desa cingcin dan menanyakan mengenai program KIP yang ada di desa cingcin , lalu ternyata pihak desa tidak memiliki data terkait penerima bantuan program KIP sehingga pihak desa menyarankan kepada praktikan untuk menemui atau mencari informasi kepada sekolah yang ada di desa Cingcin.

Sehingga pada hari Jumat 24 Februari praktikan mengunjungi salah satu Sekolah Dasar yang ada di desa Cingcin yaitu SDN 03 CINGCIN. Di hari itu praktikan bertemu dengan salah satu pengajar di sekolah tersebut yaitu Ibu Sri Astuti yang mana beliau ini merupakan penanggung jawab atau pengurus pada program bantuan KIP di SDN 03 Cingcin.

Beliau menceritakan mulai dari penyaluran dana bantuan tersebut yang mana bantuan tersebut diperoleh dari pemerintah untuk siswa yang kurang mampu , beliau mengatakan bahwa penyaluran dana tersebut melewati rekening yang telah di daftarkan sebelumnya oleh pihak sekolah melalui beberapa kriteria penerima bantuan KIP seperti siswa yang memiliki orang tua single parent, perekonomian yang menengah ke bawah , anak yatim/piatu, siswa yang masuk kedalam DTKS dsb. Lalu beliau juga menjelaskan di SDN 03 Cingcin ini terdapat 33 peserta penerima bantuan KIP yang mana bantuan tersebut memiliki nominal sebesar Rp. 225.000,- sampai Rp. 450.00,- bantuan tersebut di klasifikasikan melalui tingkatan kelas mereka .

Lalu Ibu Sri Astuti menjelaskan bebrapa keluhan yang terjadi di SDN 03 Cingcing ini yaitu seperti data yang di usulkan oleh pihak sekolah tidak masuk ke dalam penerima bantuan dan beberapa orang yang menyalahgunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadi mereka

seperti untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka sehingga hal ini menyebabkan siswa terhambat dalam proses pembelajaran.

Di hari itu juga praktikan menemui salah satu wali murid dari peserta penerima bantuan KIP beliau bernama ibu Hanifah yang mana anak dari beliau sudah mendapatkan program bantuan tersebut selama 3 tahun belakanagan ini yaitu besaran yang diterima di tahun pertama mendapatkan Rp. 225.000,- karena anak tersebut masih duduk di bangku kelas 1 Sd lalu di tahun ke 2 dan ke 3 anak tersebut mendapatkan Rp. 450.000,- karena anak ibu Hanifah ini naik ke kelas 2 dan 3 Sd. Beliau menjelaskan bahwa bantuan tersebut sangat membantu untuk keluarganya yang masih berada pada taraf ekonomi menengah ke bawah lalu beliau juga menceritakan keluhan dari program KIP ini yaitu mengalami keterlambatan pada saat penerimaan yang telah di tetapkan pada surat yang telah di edarkan melalui pihak sekolah , beliau juga menjelaskan keterlambatan itu lebih dari 3 hari bahkan pernah sekali sampai satu minggu.

Dari uraian diatas tentunya bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang terdapat di desa Cingcin seharusnya berjalan sesuai prosedur seperti mempergunakan dana tersebut untuk membeli kebutuhan sekolah seperti tujuan dari bantuan tersebut namun, di desa cingcin terdapat beberapa permasalahan seperti yang sudah di uraikan di atas mengenai dana yang tidak direalisasikan dengan benar, bantuan yang tidak tepat sasaran , dan bahkan keterlambatan proses pencairan dana.

Hal tersebut menyebabkan proses penyaluran bantuan KIP tidak maksimal dilakukan, sehingga tujuan dari bantuan Kartu Indonesia Pintar tidak sepenuhnya tercapai.

2.1.2 Tinjauan Konsep Teori yang Relevan

a. Konsep Jaminan Sosial

1) Definisi Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan suatu sistem perlindungan sosial yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko ekonomi dan sosial, seperti kemiskinan, ketidakmampuan, kecelakaan kerja, dan kehilangan pekerjaan. Berikut adalah pendapat beberapa ahli tentang jaminan sosial.

Menurut Phelps Brown dan Hopkins, jaminan sosial adalah suatu sistem perlindungan sosial yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap risiko sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Abraham Epstein, seorang tokoh jaminan sosial dari Amerika Serikat, mendefinisikan jaminan sosial sebagai suatu program perlindungan sosial yang membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. William Beveridge, seorang tokoh jaminan sosial dari Inggris, menyatakan bahwa jaminan sosial adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membebaskan manusia dari kesulitan ekonomi dan

sosial yang dapat membatasi perkembangan pribadi dan kemampuan manusia. Menurut Amartya Sen, jaminan sosial merupakan suatu cara untuk mengurangi ketimpangan sosial dan membantu masyarakat untuk meraih kesejahteraan. (Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford: Oxford University Press.)

Menurut UU NO. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sehingga dapat diartikan pula bahwa jaminan sosial adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menjamin kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peserta program jaminan sosial ditujukan kepada fakir miskin. Sistem jaminan sosial yang berlaku di Indonesia adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). SJSN adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial. SJSN bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar atau kehidupan yang layak bagi anggotanya.

b. Konsep Program Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP)

1) Definisi Program Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai dari pemerintah kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai kelanjutan dari Program Bantuan Siswa Miskin. Kartu Indonesia Pintar kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan tujuan menjamin seluruh anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan.

2) Dasar Hukum Program Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP)

UU KIP, atau UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

1. hak setiap orang untuk memperoleh Informasi
2. kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana
3. pengecualian bersifat ketat dan terbatas
4. kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

UU 14 tahun 2008 tentang KIP menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. UU 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Tujuan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Program ini ditujukan untuk menghilangkan hambatan ekonomi siswa untuk bersekolah sehingga tidak ada lagi kasus siswa yang berpikir untuk berhenti sekolah karena keterbatasan biaya. Selain menghindari anak putus sekolah, program KIP ini dibuat untuk menarik kembali siswa yang tidak bersekolah agar kembali bersekolah. Bukan hanya pada biaya administrasi pendidikan program ini juga bertujuan untuk memnuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Lebih luas lagi program ini juga mendukung program wajib pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah 12 tahun.

Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik putus sekolah karena keterbatasan biaya dan diharapkan kembali bagi siswa yang telah putus sekolah agar mereka kembali sekolah. Program ini juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik baik langsung maupun tidak langsung.

4) Manfaat Program Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Ada beberapa manfaat yang didapatkan dari program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yaitu :

1. Memiliki kartu KIP maka akan mendapatkan bantuan pendidikan berupa uang tunai yang akan disalurkan secara langsung dan bertahap ke rekening masing masing penerima selama masih terdaftar dalam peserta didik baik itu SD,SMP,SMA dan SMK.
2. Kartu Indonesia Pintar digunakan sebagai penanda dan digunakan sebagai penjamin seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang KKS untuk mendapatkan manfaat program Indonesia pintar bila terdaftar sekolah.
3. KIP juga dapat dirasakan manfaatnya bagi anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti anak anak panti asuhan, anak jalanan,pekerja anak, dan difabel. KIP juga berlaku di pondok pesantren, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus , dan pelatihan yang ditentukan oleh pemerintah.
4. KIP mendorong pengikut sertaan anak usia sekolah yang tidak terdaftar di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah.
5. KIP menjamin keberlanjutan bantuan antar jenjang pendidikan sampai tingkat SMA/SMK/MA

5) Kriteria Penerima Program Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Kartu KIP ini lebih di prioritaskan kepada mereka yang memiliki persyaratan atau memnuhi unsur unsur di bawah ini :

1. Peserta didik dari keluarga pemegang KIP,KKS (Kartu keluarga sejahtera) KPS (Kartu perlindungan sosial).
2. Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
3. Peserta didik yang berstatus yatim/piatu/panti sosial/panti asuhan
4. Peserta didik yang terkena dampak bencana alam
5. Peserta didik yang pernah drop out
6. Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah atau peserta didik dengan pertimbangan khusus lainnya , seperti :
 - a) Kelainan fisik
 - b) Korban musibah
 - c) Orang tua terkena phk
 - d) Orang tua berada di lapas
 - e) Memiliki lebih dari tiga saudara di rumah
 - f) Peserta didik yang menempuh keahlian klompok bidang seperti pertanian,perikanan,pertenakan dsb.
7. Peserta yang berada dalam lembaga khusus atau satuan lembaga non formal lainnya.

2.1.3 Asesmen

Asesmen merupakan tahap pengumpulan dan analisis data untuk memahami masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima layanan. Dalam hal ini praktikan, menggunakan metode wawancara dan observasi. Dalam menerapkan metode ini praktikan menggunakan teknik untuk memudahkan analisis data, seperti teknik analisis pohon masalah.

a. Identifikasi Masalah

Soreang adalah ibukota Kabupaten Bandung yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Bandung setelah pemindahan dari Kota Bandung dan Baleendah. Soreang juga merupakan sebuah wilayah kecamatan yang terletak di Tatar Pasundan, Kabupaten Bandung, provinsi Jawa Barat, Indonesia. Desa Cingcin merupakan desa yang berada di kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, desa Cingcin dihuni kurang lebih 30.000 jiwa.

Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai dari pemerintah kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai kelanjutan dari Program Bantuan Siswa Miskin. Kartu Indonesia Pintar kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan tujuan menjamin seluruh anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan.

Ibu Sri Astuti merupakan salah satu pengajar atau guru di SDN 03 Cingcin yang mana beliau ini merupakan penanggung jawab atau pengurus pada program bantuan KIP di SDN 03 Cingcin.

Beliau menceritakan mulai dari penyaluran dana tersebut yang mana bantuan tersebut diperoleh dari pemerintah untuk siswa yang kurang mampu, beliau menerangkan bahwa penyaluran dana tersebut melewati rekening yang telah di daftarkan sebelumnya oleh pihak sekolah melalui beberapa kriteria penerima bantuan KIP seperti siswa yang memiliki orang tua single parent, perekonomian yang menengah ke bawah, anak yatim/piatu, siswa yang masuk kedalam DTKS dsb. Lalu beliau juga menjelaskan di SDN 03 Cingcin ini terdapat 33 peserta penerima bantuan KIP yang mana bantuan tersebut memiliki nominal sebesar Rp. 225.000,- sampai Rp. 450.000,- bantuan tersebut di klasifikasikan melalui tingkatan kelas mereka.

Lalu Ibu Sri Astuti menjelaskan beberapa keluhan yang terjadi di SDN 03 Cingcin ini yaitu seperti data yang di usulkan oleh pihak sekolah tidak masuk ke dalam penerima bantuan dan beberapa orang yang menyalahgunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadi mereka seperti untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka sehingga hal ini menyebabkan siswa terhambat dalam proses pembelajaran.

Di hari itu juga praktikan menemui salah satu wali murid dari peserta penerima bantuan KIP beliau bernama ibu Hanifah yang mana anak dari beliau sudah mendapatkan program bantuan tersebut selama 3 tahun belakangan ini yaitu besaran yang diterima di tahun pertama mendapatkan Rp. 225.000,- karena anak tersebut masih duduk di bangku kelas 1 Sd lalu di tahun ke 2 dan ke 3 anak tersebut mendapatkan Rp. 450.000,- karena anak ibu Hanifah ini naik ke kelas 2 dan 3 Sd. Beliau menjelaskan bahwa bantuan tersebut sangat membantu untuk keluarganya yang masih berada pada taraf ekonomi menengah ke bawah lalu beliau juga menceritakan keluhan dari program KIP ini yaitu mengalami keterlambatan pada saat penerimaan yang telah di tetapkan pada surat yang telah di edarkan melalui pihak sekolah, beliau juga menjelaskan keterlambatan itu lebih dari 3 hari bahkan pernah sekali sampai satu minggu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga desa Cingcin yaitu ibu Hanifah dan ibu Sri Astuti yang menceritakan beberapa permasalahan yang terjadi di desa Cingcin mengenai program bantuan pemerintah KIP yaitu mereka menceritakan beberapa permasalahan seperti:

1. Penyalahgunaan dana KIP oleh keluarga penerima manfaat

Banyak para penerima bantuan KIP ini menyalah gunakan dana yang telah di berikan pemerintah, seperti yang kita tau bahwa dana tersebut harus di pergunakan dalam hal yang bersangkutan dengan

kebutuhan sekolah , seperti untuk membeli seragam,sepatu,tas,buku dsb. Namun masih banyak warga yang menyelewengkan bantuan tersebut dengan alasan barang yang mereka miliki masih layak dipakai dan mereka menggunakan dana tersebut untuk menyukupi kebutuhan pokok mereka sendiri seperti dibelanjakan beras,lauk dll

Seperti yang di jelaskan oleh Ibu Sri Astuti selaku guru atau pengajar sekaligus penanggung jawab program bantuan KIP di SDN 03 Cingcin beliau menerangkan bahwa masih banyak penerima manfaat tersebut yang menyalahgunakan dana bantuannya. Ada beberapa siswa yang mendapatkan bantuan tersebut tetapi mereka tidak menggunakan dananya untuk membeli kebutuhan sekolah mereka seperti ada salah satu siswa yang berpakaian seragam lusuh tetapi ketika sudah menerima bantuan tersebut siswa tersebut tidak juga menggantikan seragamnya dengan yang lebih baik lagi. Hal ini menimbulkan rasa ingin tahu dari pihak sekolah mengapa siswa tersebut masih saja berpakaian dengan seragam yang lusuh padahal dana bantuan tersebut sudah cair.

2. Bantuan KIP tidak tepat sasaran

Banyaknya penerima program yang kurang tepat sasaran yaitu seperti warga yang mampu banyak yang mendapatkan sedangkan warga yang benar benar tidak mampu justru tidak mendapatkan bantuan tersebut hal ini dikarenakan data yang di berikan oleh pihak sekolah tidak sampai ke pemerintah sehingga data terbaru yang di berikan oleh pihak sekolah tidak terbaca oleh system yang mana system hanya menginput data yang lalu yang sudah masuk. Tetapi pada hal ini pihak dari sekolah setiap tahunnya selalu meng- update data yang terbaru mereka.

Untuk kriteria penerima bantuan KIP ini yaitu siswa yang memiliki orang tua single parent, anak yatim/piatu, siswa yang memiliki perekonomian menengah ke bawah, siswa yang terdaftar pada DTKS.

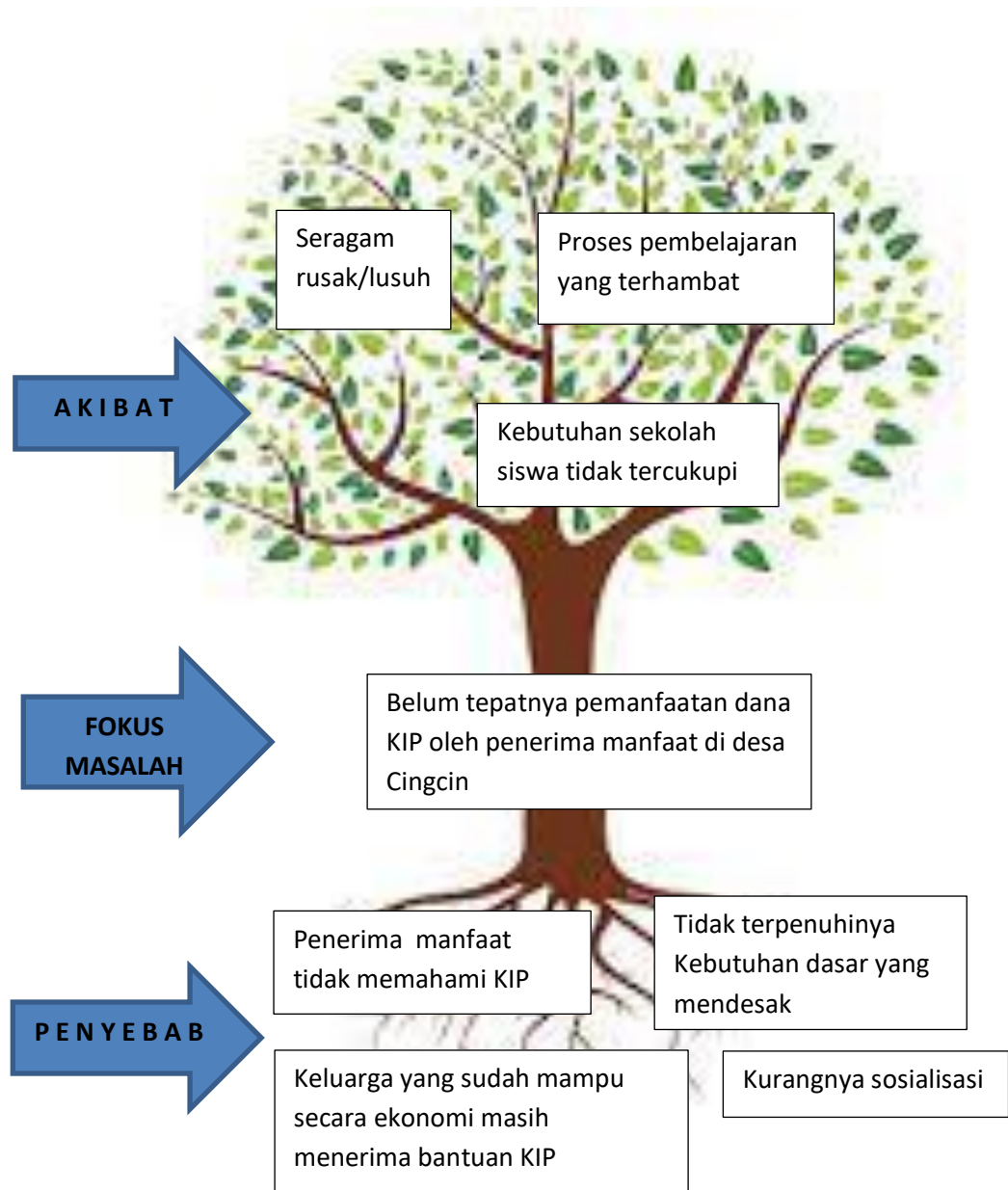
Hal ini juga yang sering kali membuat beberapa orangtua siswa di SDN 03 Cingcin protes kepada pihak sekolah karena mereka tidak mendapatkan bantuan tersebut sedangkan orang yang mampu di atas mereka malah mendapatkannya tetapi hal ini tidak bisa di pungkiri karena pihak sekolah sudah berusaha memperbarui data setiap tahunnya dan yang menginput data terbaru yaitu pemerintah sehingga pihak sekolah tidak bisa memaksakan semua pihak yang di ajukan bisa terdaftar bantuan tersebut.

3. Terjadinya keterlambatan penyaluran bantuan

Tanggal penerimaan yang tidak sesuai ini yaitu dimana tanggal yang dicantumkan pada surat yang diberikan kepada pihak penerima oleh pemerintah tidak sesuai, seperti tanggal yang tercantum pada surat yaitu tanggal 14 tetapi pada tanggal itu bantuan tersebut tidak keluar , bahkan pernah dana bantuan tersebut keluar lebih dari seminggu dari tanggal yang telah dicantumkan pada surat yang diberikan pemerintah.

Hal ini membuat banyak penerima mengeluhkan masalah tersebut bahkan ada beberapa penerima manfaat melakukan protes pada sekolah tetapi dari pihak sekolah tidak bisa menjawab apaapa dikarenakan dana bantuan tersebut turun langsung dari pemerintah kepada rekening penerima bantuan KIP tersebut tanpa melalui pihak sekolah yang mana pihak sekolah hanya menjadi penghubung saat di lakukannya pendataan siswa yang tidak mampu.

Dalam mengidentifikasi masalah praktikan menggunakan teknik Analisis Pohon Masalah, Analisa masalah mengenai Penyalahgunaan dana program KIP oleh penerima manfaat menggunakan pohon masalah. Pohon masalah dapat membantu untuk menganalisa permasalahan yang terjadi sehingga dapat mengetahui sebab akibat dan solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Batang pohon menggambarkan isu atau masalah yang sedang terjadi, sedangkan ranting pohon menggambarkan akibat dari sebab yang diilustrasikan oleh akar pohon



Gambar 1 Pohon Masalah Analis Jaminan Sosial

1) Penyebab masalah

a. Penerima manfaat tidak memahami KIP

Banyak peserta penerima KIP ini yang belum paham mengenai KIP itu sendiri sehingga tujuan dari program itu sendiri juga mereka belum mengerti sehingga banyak dari mereka menyalah gunakan dana yang seharusnya dipakai untuk kebutuhan sekolah dari penerima bantuan tersebut tetapi malah dipakai untuk hal yang tidak bersangkutan dengan kebutuhan sekolah.

b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan dasar yang mendesak

Penerima manfaat banyak yang lebih memprioritaskan kebutuhan ekonomi mereka sendiri seperti untuk membeli beras, lauk dsb sehingga tujuan dari dana bantuan itu yaitu kebutuhan sekolah tidak tercukupi.

c. Bantuan Yang Tidak Tepat Sasaran

Bantuan KIP ini belum tepat sasaran seperti orang yang lebih membutuhkan tidak mendapat bantuan KIP hal tersebut karena data yang di usulkan belum di perbarui oleh pemerintah sehingga dari permasalahan ini juga membuat beberapa orang yang tidak menerima bantuan tersebut melakukan protes atau usul kepada pihak sekolah.

d. Kurangnya Sosialisasi

Penerima manfaat pada program bantuan KIP ini sangat membutuhkan sosialisasi dikarenakan pemahaman yang masih sangat minim mengenai penggunaan dana bantuan tersebut, tetapi pada SDN 03 Cingcin sosialisasi belum terlaksana dengan baik. Seharusnya dengan adanya bantuan KIP kpm dapat mengurangi beban pengeluaran mereka untuk memnuhi kebutuhan sekolah. Namun pada kasus permasalahan ini banyak penerima manfaat yang menyalahgunakan dana dari bantuan tersebut sehingga tujuan dari di adakannya program bantuan KIP ini tidak tercapai.

2) Dampak Masalah

a. Kebutuhan Sekolah Siswa Tidak Tercukupi

Hal ini dikarenakan penerima manfaat lebih mementingkan kebutuhan ekonomi daripada kebutuhan pendidikan sehingga kebutuhan sekolah siswa yang menjadi penerima manfaat KIP tidak tercukupi.

b. Proses Pembelajaran Terhambat

Hal ini dikarenakan kurang optimalnya dari mekanisme pemberian KIP sehingga bantuan yang seharusnya meningkatkan pembelajaran malah menghambat pembelajaran siswa.

c. Seragam Rusak/Lusuh

Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan penerima manfaat terhadap tujuan penggunaan bantuan KIP sehingga bantuan disalahgunakan untuk kebutuhan lain seperti kebutuhan dasar pokok sehari-hari.

3) Fokus Masalah

Berdasarkan hasil asesmen melalui studi dokumentasi dan wawancara, maka prioritas permasalahan yang dipilih adalah Belum tepatnya pemanfaatan dana KIP oleh penerima manfaat di desa Cingcin. Alasan mengapa permasalahan tersebut menjadi prioritas adalah karena kejadian serupa hampir selalu terjadi di setiap pencairan, sehingga tujuan dari adanya program KIP tidak sepenuhnya tercapai.



Gambar 3 Wawancara dengan KPM KIP



Gambar 2 KPM KIP

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan pohon masalah diatas, dapat di tentukan bahwa kebutuhan sesuai permasalahan mengenai penyalahgunaan dana KIP di desa Cingcin adalah sebagai berikut:

1) Kebutuhan Transparasi Dana Bantuan KIP

Kebutuhan untuk transparasi penggunaan dana bantuan KIP ini merupakan kebutuhan yang penting untuk dipenuhi karena hal ini berkaitan erat dengan kebutuhan sekolah dari penerima manfaat yang harusnya tercukupi. tetapi jika tidak adanya transparasi menimbulkan rasa ketidakpercayaan muncul dari berbagai pihak.

2) Kebutuhan Mengenai Informasi atau Sosialisasi

Kebutuhan mengenai informasi penggunaan dana bantuan KIP ini berfokus pada pentingnya pengetahuan para penerima manfaat tersebut mengenai tujuan yang diberikan pemerintah melalui program KIP ini yaitu tentunya berfokus untuk membantu para siswa yang terdaftar pada program tersebut untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Sistem sumber dalam kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai potensi dan sumber yang dapat digunakan dalam usaha kesejahteraan sosial atau praktik pekerjaan sosial, selain itu sistem sumber pekerjaan sosial merupakan sesuatu yang memiliki nilai dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan serta memecahkan suatu masalah. Pincus dan Minahan (1973:4)

Potensi adalah kemampuan yang dapat dikembangkan, potensi tidak hanya berwujud sifat yang melekat pada manusia, namun dapat berupa benda, wilayah dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa potensi sumber kesejahteraan sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berikut adalah Potensi dan Sumber yang dimiliki desa Cingcin :

1) Sumber informal

Sistem sumber informal merupakan sumber yang dapat memberikan bantuan yang berupa dukungan emosional dan afeksi, nasihat dan informasi serta pelayanan-pelayanan kongkret lainnya yang dalam penggunaannya tidak memerlukan adanya prosedur. Sistem sumber informal yang dimanfaatkan dalam upaya pemecahan permasalahan ini adalah :

a. RT/RW

RT/RW dalam pemecahan masalah ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan pengarahannya tentang dana bantuan KIP yang harus di gunakan untuk kebutuhan sekolah penerima.

2) Sistem Sumber Formal

Sistem sumber formal adalah keanggotannya di dalam suatu organisasi atau asosiasi formal yang dapat memberikan bantuan atau pelayanan secara langsung kepada anggotanya. Sumber ini dapat digunakan apabila orang itu telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh sumber tersebut. Sistem sumber formal yang dimanfaatkan dalam upaya pemecahan permasalahan ini adalah:

3) Sistem Sumber Kemasyarakatan

Sistem sumber kemasyarakatan merupakan sumber baik lembaga-lembaga pemerintah ataupun swasta yang dapat memberikan bantuan pada masyarakat umum. Sistem sumber kemasyarakatan yang dimanfaatkan dalam upaya pemecahan permasalahan ini.

2.1.4 Rencana Intervensi

Rencana intervensi adalah rencana tindak atau kegiatan pelayanan yang akan dilakukan oleh klien atas dasar asesmen. Berdasarkan hasil asesmen dan analisis masalah, adapun rencana intervensi yang dibuat oleh praktikan adalah sebagai berikut:

a. Latar Belakang

Program Indonesia Pintar ini merupakan pemberian bantuan tunai dari pemerintah kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai kelanjutan dari Program Bantuan Siswa Miskin. Kartu Indonesia Pintar kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan tujuan menjamin seluruh anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan.

Pasal 34 UUD 1945 telah menjamin bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Kalimat tersebut jika kita kaji pada tataran empiris sehari-hari hanyalah sebuah cita-cita yang tidak tahu sampai kapan akan merata sampai pada lapisan masyarakat paling bawah khususnya masyarakat miskin. Upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu salah satunya melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program tersebut diharapkan dapat membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak ditemukan kasus siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena kesulitan biaya.

Namun fakta di lapangan ditemukan bahwa beberapa penerima manfaat dari program ini malah menyalahgunakan dana bantuan yang diberikan pemerintah yang seharusnya di pergunakan untuk kebutuhan sekolah tetapi tidak dipergunakan sesuai tujuannya.

b. Tujuan Umum dan Khusus

1) Tujuan Umum

Program ini ditujukan untuk menghilangkan hambatan ekonomi siswa untuk bersekolah sehingga tidak ada lagi kasus siswa yang berpikir untuk berhenti sekolah karena keterbatasan biaya. Selain menghindari anak putus sekolah, program KIP ini dibuat untuk menarik kembali siswa yang tidak bersekolah agar kembali bersekolah. Bukan hanya pada biaya administrasi pendidikan program ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Lebih luas lagi

program ini juga mendukung program wajib pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah 12 tahun.

Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik putus sekolah karena keterbatasan biaya dan diharapkan kembali bagi siswa yang telah putus sekolah agar mereka kembali sekolah. Program ini juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik baik langsung maupun tidak langsung.

2) Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari program penyuluhan sosial mengenai penggunaan dana bantuan sosial Kartu Indonesia Pintar di Desa Cingcin yaitu :

- a) Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kartu Indonesia pintar
- b) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan dana KIP
- c) Meningkatkan pemahaman resiko ketika terjadi penyalahgunaan dana bantuan tersebut

c. Bentuk Kegiatan Program

Program yang akan dilaksanakan yaitu: “Program penyuluhan sosial mengenai penggunaan dana bantuan sosial Kartu Indonesia Pintar di Desa Cingcin”

1) Sosialisasi mengenai program KIP beserta tujuannya

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tujuan dari bantuan sosial KIP. Sosialisasi ini ditujukan untuk para penerima bantuan KIP dan juga para pendamping program tersebut sehingga tidak ada lagi kesalahan penggunaan dana bantuan program KIP

2) Pengumpulan Nota Belanja dari Dana KIP

Pengumpulan nota belanja dari program bantuan KIP ini dilakukan agar terjalin transparansi antara penerima bantuan program KIP dengan pengelola dan pemerintah agar dana yang telah di berikan kepada penerima manfaat program KIP ini digunakan dengan sebaik baiknya sesuai tujuan dari program tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan sekolah peserta didik yang menerima bantuan KIP ini. Hal ini juga untuk memastikan penerima KIP menggunakan dana bantuan KIP dengan sebagaimana mestinya

4) Identifikasi keluarga penerima bantuan KIP

5) Penyadaran akan penggunaan dana KIP dengan sebagaimana mestinya.

d. Sistem Partisipan

Partisipan merupakan orang-orang yang akan terlibat atau dilibatkan dalam perubahan yang memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan rencana pemecahan masalah. Karena dalam konteks partisipan ini menunjuk pada orang-orang yang akan memiliki keterikatan penting satu sama lain, maka partisipan disini dapat dikatakan sebagai sistem partisipan. Sistem partisipan dalam Program Penyuluhan Sosial mengenai penggunaan dana bantuan sosial Kartu Indonesia Pintar di desa Cingcin yaitu :

- 1) Sistem Inisiator
Sistem inisiator merupakan individu-individu yang pertama kali melihat adanya masalah. Sistem inisiator dalam program ini adalah pekerja sosial
- 2) Sistem Agen Perubahan
Sistem agen perubahan merupakan individu-individu yang akan disertai tanggung jawab untuk mengkoordinir perubahan. Sistem agen perubahan dalam program ini adalah pekerja sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan Sekolah yang ada di desa Cingcin
- 3) Sistem Klien
Sistem klien merupakan sekelompok orang yang akan menerima pelayanan atau terkena perubahan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sistem klien dalam program ini adalah penerima bantuan KIP yang ada di desa Cingcin
- 4) Sistem Pendukung
Sistem pendukung merupakan orang-orang yang memberikan dukungan atau masyarakat yang memiliki perhatian akan keberhasilan perubahan. Sistem pendukung dalam program ini adalah pekerja sosial dan sekolah
- 5) Sistem Pengontrol
Sistem pengontrol merupakan orang-orang yang memiliki otoritas formal atau kekuasaan untuk menerima atau menolak serta mengarahkan implementasi perubahan. Sistem pengontrol dalam program ini adalah pihak sekolah dan pihak desa
- 6) Sistem Pelaksana
Sistem pelaksana merupakan orang-orang yang memiliki tugas rutin melaksanakan dan mengelola pelaksanaan perubahan. Sistem pelaksana dalam program ini adalah sekolah, pekerja sosial, pemerintah desa, dan dinas pendidikan
- 7) Sistem Sasaran
Sistem sasaran merupakan orang, struktur, atau kebijakan yang perlu diubah agar menerima manfaat perubahan seperti yang diharapkan. Sistem sasaran terdiri dari Penerima bantuan dan pendamping program
- 8) Sistem Aksi
Sistem aksi merupakan orang-orang dari berbagai sistem yang memiliki peran aktif dalam perencanaan dan implementasi rencana perubahan.

Sistem aksi dalam program ini terdiri dari pekerja sosial, dinas pendidikan, sekolah, pemerintah desa

e. Metode Dan Teknik

Metode yang akan digunakan dalam Program Penyuluhan Sosial mengenai penggunaan dana bantuan KIP adalah dengan metode community organization and community development atau pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Melihat permasalahan dan potensi untuk melakukan intervensi ke arah yang lebih baik. Persoalan dalam masyarakat berkaitan dengan kebutuhan.

Teknik intervensi yang digunakan dalam praktik ini adalah penyuluhan sosial mengenai penggunaan dana bantuan KIP di desa Cingcin. Penyuluhan merupakan suatu proses perubahan perilaku melalui pendidikan non formal, sehingga sosialisasi mengenai penyalahgunaan dana bantuan program KIP ini diharapkan masyarakat mengerti mengenai penggunaan dana bantuan KIP.

Penyuluhan akan dilaksanakan di Aula kantor desa Cingcin dengan menghadirkan narasumber yaitu, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Bandung dan juga mengundang Pendamping bantuan KIP dari sekolah beserta penerima bantuan KIP. Penyuluhan akan disampaikan dengan metode ceramah, diskusi dan Tanya jawab.

f. Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

1) Alat

LCD, Layar, Ruang Pertemuan, Kursi, Alat Tulis dan Laptop

2) Rencana Anggaran

Perhitungan biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan Program Penyuluhan Sosial mengenai penggunaan dana bantuan KIP di desa Cingcin adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 RAB Analis Jaminan Sosial

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Surat undangan KPM	100	lembar	500,00	50.000
2.	Surat Undangan Kelurahan	1	lembar	500,00	500,00
3.	Surat Undangan Dinas Pendidikan	1	lembar	500,00	500,00
4.	Surat Undangan Sekolah	1	lembar	500,00	500,00
5.	Laporan	1	paket	100.000	100.000
	TOTAL				151.500
	Konsumsi				
1.	Snack KPM	100	box	10.000	1000.000
2.	Snack Tamu Undangan	10	box	10.000	100.000
3.	Snack Panitia	8	box	10.000	80.000
4.	Makan Siang KPM	100	box	20.000	2000.000
5.	Makan Siang Tamu Undangan	10	box	20.000	200.000
6.	Makan Siang Panitia	8	box	20.000	160.000
	TOTAL				3.540.000
	Logistik				
1.	ATK	1	paket	150.000	150.000
	TOTAL				150.000
	Transportasi				
1.	Tamu Undangan	10	1 Orang	50.000	500.000
2.	Panitia	8	1 Orang	50.000	400.000
	TOTAL				900.000
	JUMLAH				4.741.500

g. Analisis Program Kelayakan SWOT

Tabel 2. 2 Analisis SWOT Analisis Jaminan Sosial

S.I S.E	Strengths 1. Memberikan pemahaman kepada KPM tentang KIP di desa Cingcin 2. Memberikan pemahaman mengenai penggunaan dana bantuan kip di desa Cingcin	Weaknesses Memerlukan waktu yang tidak sebentar agar masyarakat paham mengenai apa itu KIP dan penggunaan dana KIP
	Opportunities 1. Mendapat dukungan dari beberapa pihak yang terkait seperti sekolah,desa, dan dinas pendidikan 2. Sarana prasarana yang dibutuhkan memadai	Strategi SO 1. Penggunaan dana bantuan KIP menjadi lebih terstruktur
	Threats 1. KPM tidak mau melakukan perubahan 2. Penolakan dari KPM	Strategi WO 1. Pengumpulan nota dana bantuan KIP dari belanja KPM 2. Membuat grup WA untuk KPM KIP di desa Cingcin
	Strategi ST melakukan pendampingan oleh pihak sekolah atau pendamping KIP yang telah di tugaskan	Strategi WT Melakukan pemantauan seperti mengumpulkan nota belanja

Indikator keberhasilan :

- 1) Pemahaman masyarakat mengenai Kartu Indonesia Pintar
- 2) Pemahaman masyarakat mengenai penggunaan dana bantuan KIP
- 3) Menurunnya permasalahan penyalahgunaan dana bantuan KIP

h. Jadwal dan Langkah Langkah

1) Jadwal

Tabel 2. 3 Jadwal Analisis Jaminan Sosial

Program Penyelesaian Masalah	Tujuan	Sasaran	Penanggung Jawab	Pelaksana
Pembentukan grup Whatsaap penerima bantuan KIP	Untuk memudahkan komunikasi	Penerima bantuan KIP	Pekerja sosial	Pekerja sosial, Pendamping KIP
Sosialisasi untuk penerima bantuan KIP	Memberikan pengetahuan mengenai KIP Meningkatkan kesadaran KPM agar tidak menyalahgunakan dana bantuan yang diberikan	Penerima KIP	Pekerja sosial, sekolah	Dinas sosial Sekolah Pekerja sosial
Monitorig dan Evaluasi	Melihat perkembangan mengenai penyalahgunaan dana bantuan KIP	Penerima KIP	Pekerja sosial	Pekerja sosial Sekolah

2) Langkah – langkah

a) Pra Pelaksanaan

1) Identifikasi peserta kegiatan

Praktikan mengidentifikasi peserta yang terdaftar sebagai penerima bantuan KIP di desa Cingcin

2) Identifikasi Stakeholder

Stakeholder dapat diartikan sebagai pemangku kepentingan, dalam hal ini praktikan mengidentifikasikan stakeholder yang akan terlibat dalam pelaksanaan sosialisasi yaitu kelurahan dan sekolah.

- 3) Penyiapan Materi
Materi yang akan disampaikan adalah :
 - a. Pengenalan KIP
 - b. Penggunaan dana KIP
- 4) Penetapan Narasumber
Narasumber dalam kegiatan Sosialisasi penyuluhan penyalahgunaan dana KIP ini adalah Dinas Pendidikan dan Sekolah
- 5) Penyiapan Lokasi Kegiatan
Kegiatan Sosialisasi akan dilaksanakan di Kelurahan desa Cingcin

b) Pelaksanaan

Kegiatan Sosialisasi penyuluhan penyalahgunaan dana bantuan KIP di desa Cingcin akan dilakukan dalam satu hari . yang di narasumberi oleh Dinas Pendidikan dan sekolah yang ada di desa cingcin.

Tabel 2. 4 Rundown Acara Analis Jaminan Sosial

NO	HARI	JAM	KEGIATAN	PENGISI ACARA
1.		10.00-10.15	Pembukaan oleh MC	MC
2.		10.15-10.25	Sambutan oleh kepala desa Cingcin	Kepala Desa Cingcin
3.		10.25-11.00	Sosialisasi dari Dinas Pendidikan	Pihak Dinas
4.		11.00-11.35	Sosialisasi dari Sekolah	Pihak sekolah
5.		11.35-12.00	ISHOMA	MC
6.		12.00- 13.10	Sesi Tanya Jawab	Audien dan pembicara
7.		13.10-14.00	Simpulan	MC
8.		14.00- 14.10	Dokumentasi	Panitia
9.		14.10-14.20	Penutup	MC

c) Pasca Pelaksanaan

- 1) memonitoring pihak penerima bantuan KIP oleh pihak pendamping KIP dari sekolah
- 2) menyusun laporan

2.2 Profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

Pada profil analis pemberdayaan sosial, praktikan memilih isu mengenai bantuan sosial Rutilahu . Dalam menyusun laporan praktikum pada profil analis jaminan Sumber dana bantuan sosial, praktikan menggunakan metode desk study yaitu cara pengumpulan data dan informasi melalui pemeriksaan dan analisis data dan informasi yang menggunakan data sekunder, baik berupa dokumen-dokumen internal/eksternal perusahaan, peraturan perundang-undangan yang terkait masalah, laporan, data statistik,

studi pustaka, peta-peta dan sebagainya. Metode desk study tersebut diaplikasikan dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode dan teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi (Milya Sari dan Asmendri, 2020)

2.2.1 Gambaran Umum Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan yang hingga kini masih belum selesai dan menjadi pekerjaan besar bagi Pemerintah di Indonesia. Jumlahnya kian meningkat setelah datangnya krisis ekonomi. Selain masalah layanan kesehatan, gizi anak, layanan pendidikan, rumah tidak layak huni juga menjadi masalah banyak masyarakat miskin. Oleh karenanya pemerintah melaksanakan program RS-Rutilahu (Rehabilitasi Sosial-Rumah Tidak Layak Huni) untuk membantu masyarakat miskin yang belum memiliki rumah yang layak huni. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sekaligus mengetahui permasalahan yang ada dalam program Rutilahu serta urutan prioritas masalahnya. Rutilahu merupakan salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan Kementerian Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan/rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK.

Di Desa Cingcin sendiri memiliki 30.000 warga yang terbagi menjadi 20 RW dan 93 rt. Kepala desa Cingcin H. Aceng Syuhud Amd merupakan kepala desa yang sangat bertanggung jawab atas warganya beliau memiliki berbagai strategi untuk mensejahterakan warga desanya contohnya seperti beliau seringkali mengajukan berbagai proposal untuk bebrapa bantuan sosial dari pemerintah bahkan Csr sehingga tidak semua desa dapat menerima bantuan seperti yang ada di desa cingcin . Seperti bantuan Rutilahu ini sampai saat ini sudah mencapai 728 unit rumah yang sudah di perbaiki selama pa Aceng menjabat sebagai kepala desa kurang lebih 3th, bahkan saat ini pemerintahan desa sampai bingung warga mana lagi yang pantas mendapatkan rutilahu karena warga desa cingcin sudah memiliki rumah yang layak huni bahkan bagus. Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari kepemimpinan kepala desa yang sangat bagus.

2.2.2 Tujuan Konsep/Teori yang Relevan

a. Tinjauan konsep bantuan sosial

1) Definisi Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah bentuk program atau kebijakan yang disediakan oleh pemerintah atau organisasi lainnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut adalah pandangan beberapa ahli tentang bantuan sosial.

Menurut Richard Titmuss, bantuan sosial adalah suatu sistem yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan sosial dengan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia juga menekankan pentingnya kesetaraan dalam memberikan bantuan sosial agar tidak menimbulkan ketidakadilan sosial.

David Harvey berpendapat bahwa bantuan sosial dapat memberikan jalan keluar sementara dari kemiskinan, tetapi tidak dapat mengatasi akar penyebab kemiskinan dan ketidaksetaraan. Menurutnya, bantuan sosial hanya bersifat simptomatik dan sementara, sementara perubahan sosial dan kebijakan yang berfokus pada kesetaraan harus dilakukan untuk menangani masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan.

Lee Rainwater mendefinisikan bantuan sosial sebagai upaya pemerintah dalam menawarkan jaring pengaman bagi kelompok-kelompok masyarakat yang paling rentan, seperti anak-anak, orang tua, dan keluarga miskin. Dia juga menekankan pentingnya bantuan sosial dalam membantu membangun kemampuan kelompok-kelompok tersebut untuk memperoleh akses ke sumber daya dan peluang yang sama.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas dan penguatan lembaga. Bantuan sosial diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan agar warga Negara yang mengalami kerentanan dapat meningkatkan kapasitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara optimal.

2) Sumber Dana Bantuan Sosial

Negara, sumber dana bantuan sosial yang berasal dari negara melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pejabat yang berwenang melalui pajak yang terdapat pada APBN / APBD dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Hal ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan merupakan

kewajiban negara untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakatnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan menjauhkan masyarakat dari risiko sosial yang mungkin terjadi.

Bantuan / hibah luar negeri, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Penerimaan Dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Dari Dan Kepada Pihak Asing, Bantuan pihak asing adalah bantuan yang berasal dari pemerintah luar negeri, pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri, Perserikatan Bangsa- Bangsa atau organisasi multilateral lainnya termasuk badan-badannya, organisasi atau lembaga internasional, organisasi Kemasyarakatan luar negeri, serta badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri dan badan swasta di luar negeri. Hibah adalah penerimaan dari pemerintah luar negeri, pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi multilateral lainnya termasuk badan-badannya, organisasi atau lembaga internasional organisasi kemasyarakatan luar negeri, serta badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri dan badan swasta di luar negeri dalam bentuk rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dikembalikan.

Masyarakat , dana sosial masyarakat adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial yang dapat diberikan langsung kepada anggota / kelompok masyarakat yang bersumber dari masyarakat. Dana bantuan social yang bersumber dari masyarakat melalui dana hibah, sumbangan (pengumpulan uang dan barang), dan undian (pajak undian berhadiah).

3) Faktor yang mempengaruhi partisipasi penggalangan dana bantuan sosial

a) Terdapat kebermanfaatan ketika mengikuti program penggalangan dana.

Masyarakat berpartisipasi secara maksimal karena kegiatan yang dilakukan memiliki manfaat untuk dirinya sendiri. Manfaat yang didapatkan adalah relasi, melatih kepekaan sosial, menolong sesama dan meningkatkan kerukunan antar masyarakat karena pada dasarnya masyarakat merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.

b) Hak setiap masyarakat.

Menurut KBBI, hak adalah benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan

yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, dan wewenang menurut hukum. Di Indonesia kita mengenal PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) sekarang diubah menjadi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial baik secara formal maupun non formal. Maka dari itu masyarakat akan berpartisipasi dalam penggalangan dana bantuan sosial karena ada hak masyarakat yang harus dipenuhi. .

c) Lebih mengetahui potensi atau kebutuhan

Masyarakat akan berpartisipasi secara penuh atau maksimal dikarenakan sudah mengetahui hal hal apa saja yang dibutuhkan dan dapat dimanfaatkan dari lingkungannya. Sehingga penggalangan dana dapat dilakukan secara efektif dan efisien, dalam penyalurannya pun akan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

d) Kepekaan sosial

Masyarakat akan berpartisipasi dalam program penggalangan dana bantuan sosial dipengaruhi oleh faktor kepekaan sosial untuk membantu sesama dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. Kepekaan sosial ini dapat berwujud perasaan simpati dan empati yang dimiliki masyarakat. Empati adalah perasaan dimana seseorang dapat benar benar mengetahui perasaan dari suatu kejadian, sedangkan simpati dapat diartikan sebagai orang yang berbagi keprihatinan namun tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman mengenai kejadian tersebut.

e) Organisasi

Masyarakat akan berpartisipasi secara aktif dan maksimal ketika terikat dalam suatu komunitas seperti lingkungan RT, RW, Desa ataupun wilayah yang lebih luas lagi. Hal ini disebabkan oleh adanya kewajiban dari anggota organisasi atau komunitas untuk berpartisipasi dan mengikuti kegiatan kegiatan yang ada dalam wilayah tersebut. Contohnya adalah di Desa Kupang Rengas mengadakan jimpitan untuk membantu warganya yang kurang mampu, maka setiap warga yang mampu wajib mengikuti program tersebut.

f) Tanggung jawab sosial masyarakat

Dalam semua agama pasti mengajarkan kebaikan termasuk dalam kegiatan tolong menolong untuk sesamanya. Dicontohkan pada agama Islam yang salah satunya tertuang pada hadis dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah bersabda: “Barangsiapa yang membantu seorang muslim (dalam) suatu kesusahan di dunia maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat, dan barangsiapa yang meringankan (beban) seorang muslim yang sedang kesulitan maka Allah akan meringankan (bebannya) di dunia dan akhirat”. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban setiap umat beragama untuk saling membantu dan berpartisipasi dalam hal kebaikan.

b. Konsep Bantuan sosial Rutilahu

1) Definisi Rutilahu

Rutilahu merupakan salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan Kementerian Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan/rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK.

2) Dasar hukum Rutilahu

Proses Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan Sarana Prasarana Lingkungan diatur dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Permensos Rutilahu dan Sarling). Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan diteken Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 20 Oktober 2017 dan diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489.

Landasan hukum atau peraturan yang menjadi dasar terbitnya Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Rutilahu dan Sarling) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
- 3) Tujuan Rutilahu
- Rutilahu merupakan salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan Kementerian Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan/rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK. RS-Rutilahu beranggotakan paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 15 (lima belas) Kepala keluarga untuk satu kelompok masyarakat miskin yang tinggal berdekatan. RS-Rutilahu dilaksanakan dalam satu kelompok dengan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.
- 4) Manfaat Rutilahu
- Manfaat dari adanya program rutilahu adalah untuk membantu warga yang masih belum bisa memperbaiki rumah yang mereka huni selama ini.
- 5) Kriteria penerima bantuan Rutilahu
1. Merupakan fakir miskin yang masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang kurang mampu (DTKS)
Untuk terdaftar di DTKS, pelamar baik perseorangan maupun kelompok (3-15 kepala keluarga) dapat mengajukan permohonan ke masing-masing Kepala Desa/lurah setempat untuk melakukan verifikasi dan validasi.
 2. Belum pernah mendapatkan bantuan program RS-Rutilahu
Program ini hanya dapat dilakukannya satu kali. Bagi masyarakat yang sudah pernah memperoleh bantuan RS-Rutilahu, maka tidak bisa melakukan pendaftaran untuk kedua kalinya.

2.2.3 Asesmen

Asesmen merupakan tahap pengumpulan dan analisis data untuk memahami masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima layanan. Dalam hal ini praktikan, menggunakan metode wawancara. Dalam menerapkan metode wawancara praktikan menggunakan beberapa teknik untuk memudahkan analisis data, seperti teknik analisis pohon masalah.

a. Identifikasi masalah

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala desa Cingcin yaitu bapak H. Aceng Syuhud Amd. Di dapatkan beberapa permasalahan mengenai program bantuan Rutilahu di desa Cingcin yaitu seperti :

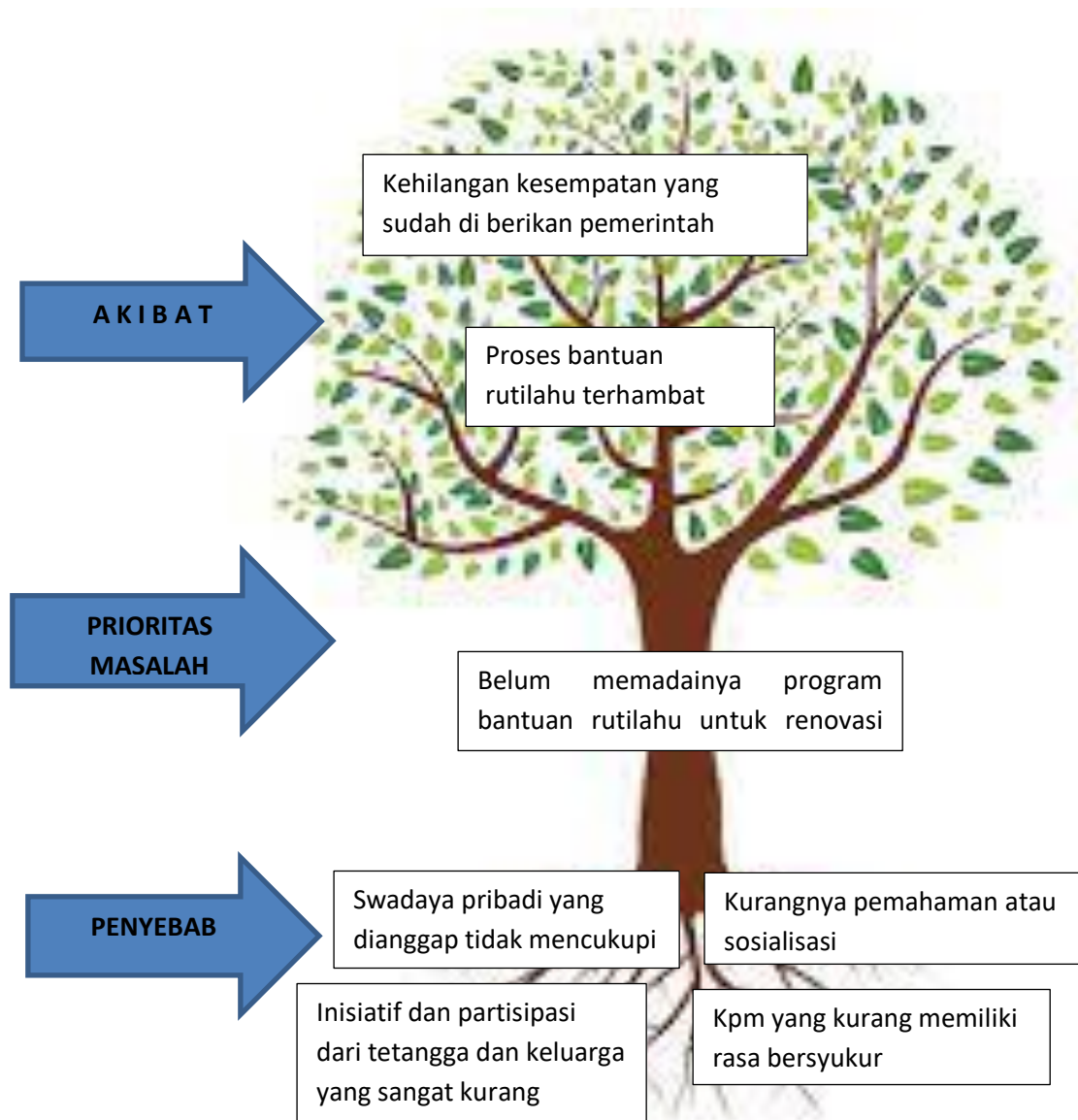
1) Peserta yang sudah terdaftar bantuan Rutilahu menolak bantuan tersebut

Ada beberapa warga yang sempat menolak program bantuan tersebut padahal mereka sudah terdaftar pada bantuan tersebut bahkan tinggal menunggu dana dari pemerintah turun. Mereka menjelaskan alasan tersebut karena dana yang mereka miliki tidak ada yang untuk menambahi perbaikan rumah tersebut karena dana yang di berikan pemerintah menurut mereka masih kurang sehingga kades desa Cingcin yaitu bapak Aceng Syuhud menjelaskan kasus tersebut karena kurangnya kesadaran dan rasa syukur dari warga tersebut sehingga dana yang di berikan pemerintah dan pemerintah desa dianggap tidak cukup untuk memperbaiki atau merenovasi rumah tersebut. Bapak Aceng syuhud ini langsung turun ke lapangan secara mandiri untuk menjelaskan dan menceritakan bahwa dana itu sangat cukup untuk memperbaiki rumah mereka.

2) Terhambatnya pendistribusian bantuan kepada peserta

Terhambatnya pendistribusian bantuan ini terjadi pada salah satu warga desa Cingcin yang mana warga tersebut sudah di daftarkan oleh desa kepada pemerintah tetapi saat pencairan dana tersebut ternyata rumah yang dimiliki warga tersebut sudah di gadaikan kepada orang lain karena factor kebutuhan ekonomi sehingga pendistribusian bantuan tersebut sangat terganggu bahkan tidak bias di lanjutkan.

Dalam mengidentifikasi masalah praktikan menggunakan teknik Analisis Pohon Masalah, Analisa masalah mengenai isu Peserta yang telah terdaftar bantuan Rutilahu menolak bantuan. Pohon masalah dapat membantu untuk menganalisa permasalahan yang terjadi sehingga dapat mengetahui sebab akibat dan solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Batang pohon menggambarkan isu atau masalah yang sedang terjadi, sedangkan ranting pohon menggambarkan akibat dari sebab yang diilustrasikan oleh akar pohon.



Gambar 4 Pohon Masalah Analis Sumber Dana Bansos

1) Penyebab masalah

a. Swadaya pribadi yang dianggap tidak memungkinkan

Banyak warga yang mengeluhkan hal tersebut karena mereka menganggap bahwa dana yang mereka miliki secara pribadi tidak dapat mencukupi kekurangan dari dana bantuan rutilahu yang di berikan oleh pemerintah

b. Kurangnya pemahaman atau sosialisasi

Penerima bantuan tersebut banyak yang kurang mengerti bantuan rutilahu itu sendiri sehingga banyak warga yang menyimpulkan berbagai

permasalahan rutilahu menurut pemikiran mereka sendiri seperti dari dana, proses renovasi dsb. Pemerintah desa sebagai penanggung jawab program tersebut harus mensosialisasikan rutilahu terlebih dahulu kepada para penerima bantuan tersebut.

c. Inisiatif dan partisipasi dari tetangga dan keluarga yang sangat kurang

Tetangga dan keluarga merupakan factor pendukung dari kesuksesan program tersebut karena tetangga dan keluarga bisa mensupport berbagai kelebihan yang mereka punya seperti tenaga, finansial, makanan dsb.

Sehingga jika factor tersebut tidak berjalan dengan baik perlu ditanyakan ada permasalahan apa. Apakah orang itu bermasalah dengan tetangga dan keluarga nya atau tidak itu juga perlu di telusuri lagi.

d. KPM yang kurang memiliki rasa bersyukur

Hal ini terlihat jelas dari keluhan penerima bantuan rutilahu yang mengeluhkan bahwa dana dari bantuan tersebut kurang padahal dana yang di berikan tidaklah sedikit bahkan dari pihak desa juga memberikan bantuan , lalu pemerintah desa juga sudah menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan stimulan atau pendorong sehingga penerima bantuan harus tetap menyiapkan dana tambahan.

2) Dampak Masalah

a. Kehilangan kesempatan yang sudah di berikan pemerintah

Seperti yang kita tahu kesempatan tidak akan datang dua kali , sehingga warga yang sudah terdaftar menjadi peserta program bantuan rutilahu jika menolak akan kehilangan kesempatan yang tidak bias di dapatkan semua orang .

b. Proses bantuan Rutilahu terhambat

Terhambatnya proses bantuan rutilahu karena beberapa permasalahan seperti salah satunya penolakan oleh peserta yang sudah terdaftar hal ini sangat menghambat proses bantuan rutilahu karena yang seharusnya bantuan tersebut sudah bias berjalan tetapi karena ada kendala ini maka pemerintah daerah atau pemerintah desa harus memperbaiki permasalahan tersebut dulu karena jika tidak hal ini akan menghambat proses kedepannya.

3) Fokus Masalah

Berdasarkan hasil asesmen melalui studi dokumentasi dan wawancara, maka prioritas permasalahan yang dipilih adalah Belum memadainya program bantuan rutilahu untuk renovasi rumah warga. Hal ini dikarenakan warga penerima bantuan tersebut belum mengerti sepenuhnya mengenai bantuan rutilahu tersebut atau bias disebut mereka kurang sosialisasi , sehingga pemerintah mengadakan sosialisasi mengenai program tersebut. Pemerintah desa juga menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan stimulant atau dorongan sehingga bantuan ini tidak sepenuhnya bias mewujudkan kemauan warga mengenai perbaikan rumah mereka.

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan pohon masalah di atas, dapat ditentukan bahwa kebutuhan sesuai permasalahan adalah sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan akan pengetahuan mengenai bantuan Rutilahu
- 2) Kebutuhan akan pengetahuan mengenai penolakan bantuan Rutilahu

c. Identifikasi Sistem Sumber

Sistem sumber dalam kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai potensi dan sumber yang dapat digunakan dalam usaha kesejahteraan sosial atau praktik pekerjaan sosial, selain itu sistem sumber pekerjaan sosial merupakan sesuatu yang memiliki nilai dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan serta memecahkan suatu masalah. Adapun Pincus dan Minahan (1973:4) mengklasifikasikan sistem sumber kesejahteraan sosial menjadi sistem sumber informal atau alamiah, sistem sumber formal, dan sistem sumber kemasyarakatan. Adapun sistem sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pemecahan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sistem sumber informal

Sistem sumber informal merupakan sumber yang dapat memberikan bantuan yang berupa dukungan emosional dan afeksi, nasihat dan informasi serta pelayanan-pelayanan kongkret lainnya yang dalam penggunaannya tidak memerlukan adanya prosedur. Sistem sumber informal yang dimanfaatkan dalam upaya pemecahan permasalahan ini adalah:

- a. Tetangga
- b. Keluarga

2) Sistem sumber formal

Sistem sumber formal adalah keanggotannya di dalam suatu organisasi atau asosiasi formal yang dapat memberikan bantuan atau pelayanan secara langsung kepada anggotanya. Sumber ini dapat digunakan apabila orang itu telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh sumber tersebut. Adapun sistem sumber formal yang dimanfaatkan dalam upaya pemecahan permasalahan ini adalah:

a. RT/RW

Ketua RT dan RW memiliki kedekatan yang erat dengan warga penerima bantuan karena ia juga menjadi bagian dari masyarakat tersebut.

b. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa memiliki kedekatan yang cukup erat dengan masyarakat, sehingga pemerintah desa dapat dijadikan sistem sumber agar masyarakatnya lebih terarah lagi

3) Sistem sumber kemasyarakatan

Sistem sumber kemasyarakatan merupakan sumber baik lembaga-lembaga pemerintah ataupun swasta yang dapat memberikan bantuan pada

masyarakat umum. Adapun sitem sumber kemasyarakatan yang dimanfaatkan dalam upaya pemecahan permasalahan ini adalah:

- a. Dinas Sosial
- b. Perusahaan Terkait

2.2.4 Rencana Intervensi

Rencana intervensi adalah rencana tindak atau kegiatan pelayanan yang akan dilakukan oleh klien atas dasar asesmen. Berdasarkan hasil asesmen dan analisis masalah, adapun rencana intervensi yang dibuat oleh praktikan adalah sebagai berikut :

a. Latar Belakang

Bantuan sosial merupakan bantuan yang diberikan baik berupa uang barang atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin atau rentan terhadap risiko sosial. Bantuan seharusnya bersifat transparan baik dari segi pengeluaran atau pemasukan, dapat dengan mudah diakses oleh donatur atau penyumbang dana dan pengurus lainnya. Kemudian harus sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan yaitu membantu masyarakat agar tidak terjadi penyelewengan atau kurang tepatnya sasaran.

Rutilahu merupakan salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan Kementerian Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan/rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK.

b. Tujuan Umum dan Khusus

a) Tujuan Umum

Rutilahu merupakan salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan Kementerian Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan/rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK. RS-Rutilahu beranggotakan paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 15 (lima belas) Kepala keluarga untuk satu kelompok masyarakat miskin yang tinggal berdekatan. RS-Rutilahu dilaksanakan dalam satu kelompok dengan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.

b) Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari program bantuan Rutilahu di desa Cingcin yaitu :

- a) Memperkenalkan Perusahaan yang memberikan bantuan sosial tersebut

- b) Membantu masyarakat desa Cingcin agar memiliki tempat tinggal yang lebih layak lagi
- c) Membantu menuntaskan kemiskinan di desa Cingcin

c. Bentuk kegiatan dan program

Dalam rencana pemecahan masalah ini akan berfokus pada Sosialisasi mengenai Rutilahu yang di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan seperti:

1. Mengenalkan program Rutilahu beserta persiapan yang harus disiapkan oleh penerima bantuan tersebut.
2. Menyisir atau mencaritahu tentang keluarga atau tetangga dari penerima bantuan tersebut.
3. Membekali fasilitator yang mana dia harus mau bekerjasama dengan pihak desa
4. Memonitoring program tersebut

d. Sistem Partisipan

Partisipan merupakan orang-orang yang akan terlibat atau dilibatkan dalam perubahan yang memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan rencana pemecahan masalah. Karena dalam konteks partisipan ini menunjuk pada orang-orang yang akan memiliki keterikatan penting satu sama lain, maka partisipan disini dapat dikatakan sebagai sistem partisipan. Adapun sistem partisipan dalam Program yang sudah disampaikan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem Inisiator
Sistem inisiator merupakan individu-individu yang pertama kali melihat adanya masalah. Sistem inisiator dalam program ini adalah pekerja sosial
- 2) Sistem Agen Perubahan
Sistem agen perubahan merupakan individu-individu yang akan diserahkan tanggung jawab untuk mengkoordinir perubahan. Sistem agen perubahan dalam program ini adalah pekerja sosial dan Pemerintah Desa Cingcin.
- 3) Sistem Klien
Sistem klien merupakan sekelompok orang yang akan menerima pelayanan atau terkena perubahan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sistem klien dalam program ini adalah penerima bantuan Rutilahu di desa Cingcin
- 4) Sistem Pendukung
Sistem pendukung merupakan orang-orang yang memberikan dukungan atau masyarakat yang memiliki perhatian akan keberhasilan perubahan. Sistem pendukung dalam program ini adalah pendamping program

- 5) **Sistem Pengontrol**
Sistem pengontrol merupakan orang-orang yang memiliki otoritas formal atau kekuasaan untuk menerima atau menolak serta mengarahkan implementasi perubahan. Sistem pengontrol dalam program ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bandung
- 6) **Sistem Pelaksana**
Sistem pelaksana merupakan orang-orang yang memiliki tugas rutin melaksanakan dan mengelola pelaksanaan perubahan. Sistem pelaksana dalam program ini adalah pendamping program rutilahu dan fasilitator
- 7) **Sistem Sasaran**
Sistem sasaran merupakan orang, struktur, atau kebijakan yang perlu dirubah agar menerima manfaat perubahan seperti yang diharapkan. Sistem sasaran yaitu warga yang terdaftar program bantuan rutilahu.
- 8) **Sistem Aksi**
Sistem aksi merupakan orang-orang dari berbagai sistem yang memiliki peran aktif dalam perencanaan dan implementasi rencana perubahan. Sistem aksi dalam program ini terdiri dari pekerja sosial, Dinas Sosial, Pemerintah desa Cingcin

e. Metode dan Teknik

Metode yang digunakan dalam praktikum ini adalah Community Organization atau pengorganisasian masyarakat yaitu proses untuk mengembangkan kekuatan yang melibatkan berbagai pihak dalam menggali berbagai persoalan yang berada di lingkungan masyarakat dengan melihat permasalahan dan potensi untuk melakukan intervensi ke arah yang lebih baik. Persoalan dalam masyarakat berkaitan dengan kebutuhan.

Teknik yang digunakan dalam pelaksanaan program ini adalah dengan penyuluhan sosial. Penyuluhan sosial adalah memberikan penerangan/penjelasan kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang belum diketahui untuk dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyuluhan ini diberikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program rutilahu

f. Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

1) Alat

LCD, Layar, Kursi, Alat Tulis dan Laptop

2) Rencana Anggaran Biaya

Tabel 2. 5 RAB Analisis Sumber Dana Bansos

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
KONSUMSI					
1.	Snack peserta	20 orang	box	5000	100.000
2.	Snack panitia	8 orang	box	5000	45.0000
3.	Snack Tamu undangan	6 orang	box	5000	30.000
4.	Makan siang	34 orang	box	20.000	680.000
	TOTAL				855.000
LOGISTIK					
1.	ATK	1	PAKET	150.000	150.000
	TOTAL				150.000
JUMLAH					1.005.000

g. Analisis kelayakan program SWOT

Tabel 2. 6 Analisis SWOT Analisis Sumber Dana Bansos

F.I F. Eks	Strengths Kepala desa yang memiliki pemahaman mengenai Rutilahu	Weaknesses Beberapa warga yang tidak mengerti Rutilahu
	Opportunities 1. Fasilitator atau pendamping program dapat mengarahkan dan memberitahu mengenai program bantuan rutilahu 2. peningkatan kinerja fasilitator atau pendamping program	Strategi SO Fasilitator atau pendamping program menjadi narasumber penyuluhan program bantuan Rutilahu
	Threats 1. tetangga dan keluarga yang tidak mau membantu 2. penrima bantuan yang tidak mau mengikuti program sosialisasi	Strategi WO 1. pengefektifan kegiatan di hari yang telah di tentukan 2. fasilitator atau penanggungjawab program menjadi penggerak program
	Strategi ST Melibatkan fasilitator atau pendamping serta RT/RW untuk memberikan pemahaman atau mensosialisasikan program rutilahu dengan benar	Strategi WT Dalam melakukan penyuluhan disertai juga dengan sesi diskusi yang bersifat demokrasi dan setiap orang memiliki hak suara.

Indikator Keberhasilan :

1. Peningkatan pengetahuan warga mengenai Rutilahu
2. Tidak ada penolakan warga mengenai program rutilahu
3. Kesadaran Keluarga dan Tetangga penerima bantuan untuk membantu mensukseskan program tersebut
4. Peningkatan kinerja Fasilitator atau pendamping program bantuan Rutilahu

h. Jadwal dan Langkah langkah

1) Jadwal Pelaksanaan

Tabel 2. 7 Jadwal Analis Sumber Dana Bansos

Program Penyelesaian Masalah	Tujuan	Sasaran	Penanggung Jawab	Pelaksana	Jadwal Kerja	Sumber Biaya
Penyuluhan mengenai Rutilahu kepada Fasilitator dan warga penerima program bantuan Rutilahu	Untuk meningkatkan pemahaman dan memberikan pengertian mengenai persiapan program rutilahu	Fasilitator dan penerima bantuan rutilahu	Pekerja sosial dan Pemerintah Desa	Pekerja sosial	1 hari	Desa Cingcin
Memonitoring dan evaluasi program	Melihat dan mengawasi berjalannya program rutilahu	Penerima bantuan program rutilahu	Pekerja sosial dan fasilitator	fasilitator	Sesuai program rutilahu	

2) Langkah – langkah

a) Pra Pelaksanaan

1) Identifikasi sasaran kegiatan

Praktikan mengidentifikasi sasaran kegiatan penyuluhan Tugas Pokok dan Fungsi Fasilitator atau pendamping program.

2) Identifikasi Stakeholder

Stakeholder dapat diartikan sebagai pemangku kepentingan, dalam hal ini praktikan mengidentifikasikan stakeholder yang akan terlibat dalam pelaksanaan penyuluhan yaitu Kelurahan.

3) Penyiapan Materi

Materi yang akan disampaikan adalah :

a. Pengertian Rutilahu

b. Sanksi dan Resiko ketika menolak program rutilahu

4) Pemetaan Narasumber

Narasumber dalam Kegiatan Penyuluhan program rutilahu yaitu Fasilitator atau pendamping program tersebut.

5) Penyiapan Lokasi Kegiatan

Kegiatan Penyuluhan akan Aula desa Cingcin

b) Pelaksanaan

Kegiatan Penyuluhan program bantuan Rutilahu akan dilakukan dalam satu hari. Yang akan di buka sesi tanya jawab oleh penerima bantuan, fasilitator dan dinas sosial.

Tabel 2. 8 Rundown Analis Sumber Dana Bansos

No	Pukul	Kegiatan	Pengisi
1.	10.00-10.10	Pembukaan	MC
2.	10.10-10.20	Sambutan Kepala desa Cingcin	Kepala desa Cingcin
3.	10.20-10.50	Pemberian materi oleh Dinas sosial	Petugas Dinas Sosial
4.	10.50-11.20	Penyuluhan kegiatan Rutilahu oleh fasilitator/pendamping	Fasilitator/pendamping program
5.	11.20-11.35	Sesi tanya jawab	audiensi
6.	11.35-12.00	ISHOMA	
7.	12.00-12.15	Simpulan	MC
8.	12.15-12.25	Dokumentasi	MC
9.	12.25-12.35	Penutup	MC

c) Pasca pelaksanaan program

1. Memonitoring program kegiatan Rutilahu
2. Menyusun Laporan

2.3 Profil Analis Pemberdayaan Sosial

Pada profil analisis Penataan Pemberdayan Sosial, praktikan memilih isu mengenai Tingginya jumlah PRSE di Desa Cingcin Kecamatan Soreang menggunakan metode wawancara, melakukan proses tanya jawab yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan dari pihak praktikan dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai

2.3.1 Gambaran Umum Masalah

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) adalah seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun, belum menikah atau sudah menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari Tuntutan ekonomi yang berat mendorong perempuan untuk mencari nafkah demi kesejahteraanya berbagai motivasi perempuan bekerja, yaitu suami tidak memiliki penghasilan yang cukup sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan rumah tangga, sedangkan tanggungan cukup berat pada keluarganya, sehingga perempuan akan bekerja untuk mencari uang sendiri untuk menafkahi seluruh anggota keluarganya.

Menurut Permensos No. 8 Tahun 2012, Perempuan rawan sosial ekonomi memiliki kriteria perempuan berusia 18-59 tahun, istri yang ditinggalkan suami tanpa kejelasan, pencari nafkah utama keluarga dan berpenghasilan kurang atau tidak mampu mencukupi untuk kebutuhan hidup yang layak. Dalam sebuah keluarga, perempuan sejatinya bukan hanya berperan sebagai seorang istri, namun perempuan juga berperan sangat penting dalam menjalankan sebuah keluarga, ketika kebutuhan keluarga tersebut tidak terpenuhi, maka peran perempuan akan bertambah untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarganya, dengan cara mencari nafkah tambahan demi kelangsungan hidup seluruh anggota keluarganya. Apabila perempuan sebagai kepala rumah tangga atau orang tua tunggal tidak memiliki kemampuan yang baik maka akan mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan dan menjalankan hidupnya dengan layak. Oleh karena itu Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) membutuhkan pemberdayaan agar dapat meningkatkan kesejahteraan. Dimana kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hal ini dapat dipenuhi dengan dilakukannya pemberdayaan sosial yang bertujuan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. (UU No 11 Tahun 2009)

2.3.2 Tinjauan Konsep/Teori yang Relevan

a. Tinjauan Konsep Pemberdayaan Sosial

1) Definisi Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial adalah suatu proses untuk memberikan dukungan dan memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapinya. Berikut ini adalah pandangan beberapa ahli tentang pemberdayaan sosial. Paulo Freire berpendapat bahwa pemberdayaan sosial melibatkan pemberian pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi. Dia juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dan kesetaraan dalam proses pemberdayaan sosial.

Michael Foucault berpendapat bahwa pemberdayaan sosial harus dilakukan melalui penguatan kekuatan dan kapasitas individu dan masyarakat untuk memperjuangkan keadilan sosial. Dia juga menekankan pentingnya mengubah hubungan kekuasaan yang tidak seimbang dalam masyarakat untuk mencapai pemberdayaan sosial yang lebih luas. Amartya Sen berpendapat bahwa pemberdayaan sosial adalah tentang memberikan masyarakat kontrol atas kehidupan mereka sendiri dan memperkuat kemampuan mereka untuk membuat pilihan yang lebih baik dalam

memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dia juga menekankan pentingnya akses yang adil dan setara terhadap sumber daya dan kesempatan yang diperlukan untuk mencapai pemberdayaan sosial yang sejati.

Berdasarkan UU 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk memberdayakan individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami masalah sosial agar mampu meningkatkan kualitas kehidupannya secara mandiri; dan meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Ife (1995) menyatakan bahwa :

Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to 'work the system,' and so on (Ife, 1995).

Definisi tersebut di atas mengartikan konsep pemberdayaan (empowerment) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Di sisi lain Paul (1987) dalam Prijono dan Pranarka (1996) mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap "proses dan hasil-hasil pembangunan." Sedangkan konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.

2) Dasar Hukum Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial

Peraturan atau dasar hukum yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan sosial yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
3. Undang-Undang No.14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial

3) Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

a) Perbaikan kelembagaan (*better institution*)

Yang pertama adalah perbaikan kelembagaan melalui perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan pada akhirnya juga akan

berimbang pada pengembangan jejaring kemitraan usaha di tengah masyarakat.

b) Perbaikan usaha (*better business*)

Sebagai dampak dari poin pertama, pemberdayaan masyarakat juga diharapkan berimbang pada perbaikan usaha. Upaya yang dapat dilakukan untuk tujuan ini adalah seperti perbaikan pendidikan dengan meningkatkan semangat belajar, perbaikan terhadap akses bisnis, termasuk perbaikan kegiatan dan juga perbaikan kelembagaan yang diharapkan dapat memperbaiki bisnis masyarakat.

c) Perbaikan pendapatan (*better income*)

Tujuan selanjutnya juga masih berkaitan yakni perbaikan pendapatan atau *better income* sebagai dampak positif adanya perbaikan bisnis. Dengan adanya perbaikan usaha atau bisnis, diharapkan pendapatan keluarga dan masyarakat dapat meningkat.

d) Perbaikan lingkungan (*better environment*)

Meski tidak berkaitan langsung dengan tujuan sebelumnya, namun diharapkan dengan adanya perbaikan pendapatan dan juga pendidikan nantinya juga dapat memperbaiki keadaan lingkungan baik berupa lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Alasannya karena kerusakan lingkungan kadangkala disebabkan oleh kemiskinan karena rendahnya pendapatan.

e) Perbaikan kehidupan (*better living*).

Tahapan selanjutnya dari tujuan pemberdayaan masyarakat setelah dapat meningkatkan tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik adalah dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

f) Perbaikan masyarakat (*better community*).

Tingkatan terakhir dari tujuan pemberdayaan adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik karena didukung oleh kehidupan yang lebih baik sebagai dampak dari keberhasilan dalam pemberdayaan lingkungan baik fisik maupun sosial.

b. Tinjauan Konsep Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)

1) Definisi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)

Dalam Peraturan Menteri Sosial Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial No 8 Tahun 2012 bahwa “Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari”. Perempuan yang dapat tergolong sebagai Perempuan Rawan Sosial Ekonomi mempunyai kriteria yaitu :

1. Perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 tahun
2. Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan.
3. Menjadi pencari nafkah utama keluarga, dan
4. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kehidupan layak.

Sehingga perempuan yang masuk dalam kriteria tersebut dapat digolongkan sebagai Perempuan Rawan Sosial Ekonomi. Menurut Kementerian Sosial, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi atau Wanita Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang wanita yang karena faktor kemiskinannya, keterbelakangan dan kebodohnya mengalami gangguan fungsional dalam kehidupan sosial dan atau ekonominya sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan untuk menjalankan peranan sosialnya (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2017). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perempuan rawan sosial ekonomi adalah perempuan yang mengalami permasalahan dibidang ekonomi dan kesejahteraan sosial haruslah mendapat respon dari pemerintah demi pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya dengan menciptakan satu kebijakan sebagai bentuk penanganan yang tepat. Kehidupan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) didalam buku Profil Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang merupakan kerjasama antara Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI dengan Badan Pusat Statistik RI tahun 2010 adalah tergolong kelompok miskin (hidup di bawah garis kemiskinan).

Kemiskinan adalah keadaan dimana masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

2) Masalah yang dihadapi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia dalam Bambang Rustanto (2017) bahwa masalah-masalah yang dihadapi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah :

1. Pengetahuan dan keterampilan mereka yang pada umumnya masih rendah.
2. Kesempatan kerja untuk wanita dalam proses produksi cenderung terbatas.
3. Masalah kondisi sosial lingkungan keluarga yang tidak mendukung.
4. Produktivitas dan upah rendah.
5. Masalah sosial budaya khususnya pergeseran nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat.
6. Kemampuan dan pembinaan kesejahteraan keluarga belum memadai terutama dalam pemenuhan gizi dan perawatan kesehatan

3) Faktor penyebab Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)

Permasalahan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi kebanyakan dilatarbelakangi oleh beberapa alasan antara lain kehilangan suami, tidak mendapatkan kesempatan dalam lapangan pekerjaan, beban dan tanggung jawab yang cukup berat untuk menghidupi anak-anak tanpa persiapan yang matang saat masih bersama suami, serta tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Perhatian khusus terhadap perempuan rawan sosial ekonomi sangat penting karena beban berat perempuan tersebut

semakin besar sementara kemampuan yang dimiliki beserta kesempatan yang diberikan kepada mereka masih terbatas.

Meningkatnya beban jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas secara sungguh sungguh akan menimbulkan permasalahan sosial yang baru seperti stress, depresi, ketelantaran dan kurang gizi. Seorang perempuan yang lahir kedunia, tumbuh, berkembang dan berkeluarga tidak serta merta menjadi perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE), apabila tidak ada penyebabnya.

Kementrian Sosial RI dalam Neli Suarni (2003) mengemukakan bahwa faktor penyebab permasalahan sosial yang dialami PRSE adalah :

a. Faktor Internal

Faktor yang menyebabkan terjadinya suatu masalah yang berasal dari dalam diri perempuan tersebut adalah adanya keterbatasan yang dimiliki antara lain keterbatasan ilmu pengetahuan dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan fisik yang disebabkan oleh kekurangan kemampuan fisik untuk melakukan kegiatan serta tingkat intelegensi yang rata-rata masih dibawah kaum pria, masih adanya rasa kurang percaya diri, apatis, rendah diri dan rendahnya aspek sosial budaya.

b. Faktor Eksternal

Faktor yang berasal dari luar diri PRSE adalah kurangnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, distribusi pendapatan yang kurang merata dan diskriminasi yang mereka alami dalam mendapatkan pekerjaan. Penyebab permasalahan kemiskinan yang dialami PRSE pada umumnya adalah pendidikan rendah, keterampilan yang dimiliki perempuan masih minim bahkan tidak memiliki keterampilan sama sekali, dan diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan.

c. Faktor Pendapatan

Pendapatan didefinisikan sebagai seluruh sejumlah uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu. Pendapatan terdiri dari upah atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga, dividen serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran (Samuelson dan Nordhaus, 2003). Pendapatan menurut ilmu ekonomi diartikan sebagai nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam satu periode seperti keadaan semula. Definisi tersebut menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain pendapatan merupakan jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi. Secara garis besar pendapatan didefinisikan sebagai jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang (Zulrisky, 2008).

Beberapa faktor pendapatan yang mengakibatkan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, yaitu:

- a) **Besarnya upah** yang diterima oleh rata-rata rumah tangga akan menambah kemungkinan untuk menjadi tidak miskin
- b) **Jenis Pekerjaan**, banyak masyarakat memilih untuk bekerja pada sektor informal dibandingkan di sektor formal hal ini dikarenakan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan bahan bakar rumah tangga minimum, selain itu juga masyarakat relatif lebih suka bekerja di sektor informal dibandingkan sektor formal.
- c) **Kurangnya lahan produktif sebagai aset penghasilan pendapatan**, masyarakat meyakini bahwa keterampilan dan pengetahuan yang mereka miliki lebih banyak berperan dalam menyumbang keadaan miskin yang mereka alami sehingga tidak memiliki banyak pilihan dalam pekerjaan dan memilih bekerja sebagai buruh serabutan.
- d) **Upah minimum yang tidak memadai**, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja.

Penyebab permasalahan kemiskinan yang dialami PRSE pada umumnya adalah pendidikan rendah, keterampilan yang dimiliki perempuan masih minim bahkan tidak memiliki keterampilan sama sekali, dan diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan. Hal diatas berdampak pada kurangnya kesempatan perempuan untuk bekerja pada sektor-sektor pemerintah maupun swasta, serta persaingan di dunia usaha yang memerlukan kualifikasi pendidikan dan keterampilan tertentu. Sehingga tersisih dalam mencari pekerjaan yang cenderung mengandalkan kekuatan fisik.

2.3.3 Assesment

Assemen merupakan tahap pengumpulan dan analisis data untuk memahami masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima layanan. Dalam hal ini praktikan, menggunakan metode wawancara. Dalam menerapkan metode wawancara praktikan menggunakan beberapa teknik untuk memudahkan analisis data, seperti teknik analisis pohon masalah.

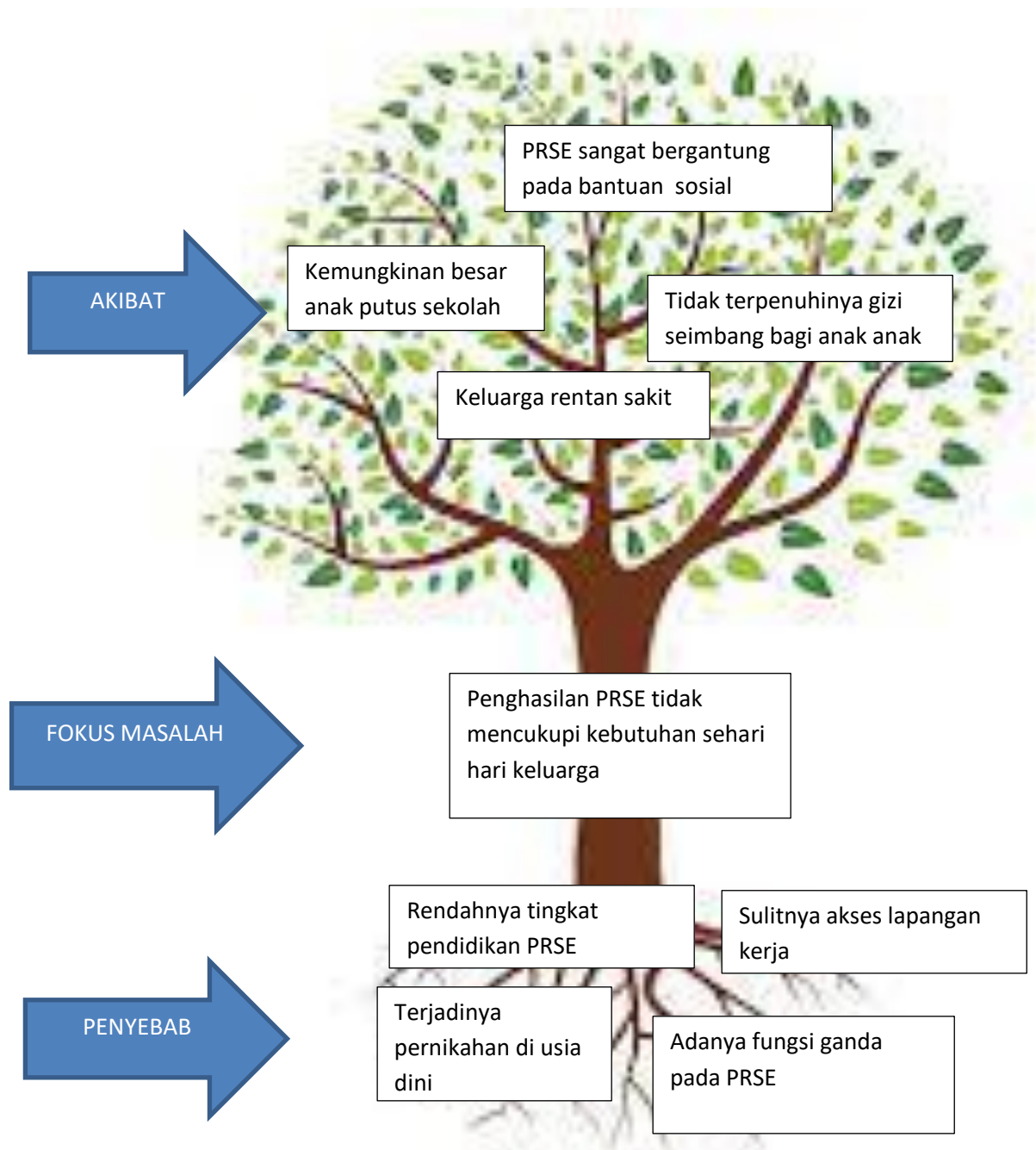
a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala dusun Bapak Dedi dan kasie kesra Bapak Aditya Pamungkas didapatkan beberapa permasalahan mengenai PRSE di Desa Cingcin yaitu :

- 1) Belum adanya kegiatan pemberdayaan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), hal tersebut karena pihak kelurahan belum menyoroti dengan khusus mengenai PRSE.
- 2) Tingginya jumlah PRSE, hal tersebut mulai dari janda, kemudian beberapa perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga karena suaminya tidak bekerja.
- 3) Kurangnya perhatian masyarakat mengenai PRSE, hal tersebut karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai PRSE yang seharusnya mendapat perlindungan dari lingkungannya.

Dalam mengidentifikasi masalah praktikan menggunakan teknik Analisis Pohon Masalah, Analisa masalah mengenai isu Penghasilan PRSE tidak mencukupi kebutuhan sehari hari keluarga.

Pohon masalah dapat membantu untuk menganalisa permasalahan yang terjadi sehingga dapat mengetahui sebab akibat dan solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Batang pohon menggambarkan isu atau masalah yang sedang terjadi, sedangkan ranting pohon menggambarkan akibat dari sebab yang diilustrasikan oleh akar pohon



Gambar 5 Pohon Masalah Analisis Pemberdayaan Sosial

1) Penyebab masalah

1. Rendahnya tingkat pendidikan PRSE

Hubungan tingkat pendidikan terhadap pendapatan dapat dinyatakan dengan hipotesis bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi tingkat pendapatannya, demikian sebaliknya. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan

pendapatan antar masyarakat. Di sisi lain hubungan ini berkenaan dengan Status pekerjaan yang diperoleh seseorang pada tingkat pendidikan tertentu. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin baik kemampuan yang di miliki seseorang. Pada dasarnya pendidikan bertujuan untuk meningkatkan sumberdaya manusia agar lebih terampil dan berpotensi dalam meningkatkan partisipasinya sebagai anggota masyarakat.

2. Terjadinya pernikahan di usia dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria. Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Faktor tersebut menjadi salah satu penyebab tingginya jumlah PRSE di Desa Cingcin.

3. Sulitnya akses lapangan kerja

Wilayah desa Cingcin tidak memiliki lapangan pekerjaan yang luas untuk menyerap tenaga kerja yang ada. Beberapa pabrik paling banyak hanya menyerap orang-orang yang memiliki kriteria seperti yang sudah ditetapkan pada pabrik tersebut sedangkan para PRSE ini masih kurang untuk memenuhi standar kriteria yang dicari oleh pabrik yang ada di daerah cingcin, Sedangkan untuk bekerja di industri rumahan mereka tidak memiliki keterampilan pada bidang tersebut.

4. Adanya fungsi ganda pada PRSE

Kemampuan perempuan untuk memainkan peran ganda dalam rumah tangga, yaitu sebagai ibu rumah tangga/tulang punggung keluarga dalam pencari nafkah (tuntutan kebutuhan ekonomi) keluarga menjadi nyata bagi kaum perempuan yang hidup, tumbuh dan berkembang pada kalangan masyarakat modern.

2) Dampak Masalah

1. PRSE sangat bergantung pada bantuan sosial

Berkaitan dengan kondisi ekonomi yang juga pas-pasan, mengakibatkan PRSE bergantung dengan bansos. Seharusnya tujuan bantuan sosial baik PKH maupun BPNT adalah mengurangi beban pengeluaran KPM. Namun karena kondisi tersebut mereka menjadi bergantung dengan Bansos. Apabila kondisi tersebut tetap terjadi maka PRSE tidak berkembang untuk mencapai graduasi.

2. Kemungkinan besar anak putus sekolah

Kemungkinan besar anak putus sekolah diakibatkan oleh kurangnya biaya menyekolahkan anak-anak mereka sehingga banyak anak dari PRSE ini terpaksa tidak bersekolah. PRSE ini lebih mementingkan kebutuhan pokoknya daripada untuk menyekolahkan anak mereka bahkan mereka mengatakan kebutuhan pokok saja jarang tercukupi dan selalu kekurangan, apalagi untuk menyekolahkan anak.

3. Tidak terpenuhinya gizi seimbang bagi anak-anak

Banyak anak dari PRSE ini kekurangan gizi karena mereka hanya makan apa yang mereka miliki saja bahkan untuk makan sehari harinya saja mereka sering hanya sehari sekali atau dua kali karena mereka tidak mempunyai uang untuk membelanjakan kebutuhan pokok mereka.

4. Keluarga rentan sakit

Keluarga PRSE rentan sakit karena kebutuhan gizi mereka tidak tercukupi bahkan banyak dari keluarga mereka terkena penyakit magh karena selalu telat untuk makan.

3) Fokus Masalah

Berdasarkan hasil asesmen melalui wawancara, maka prioritas permasalahan yang dipilih adalah Penghasilan PRSE tidak mencukupi kebutuhan sehari hari keluarga. Kemampuan perempuan untuk memainkan peran ganda dalam rumah tangga, yaitu sebagai ibu rumah tangga/tulang punggung keluarga dalam pencari nafkah (tuntutan kebutuhan ekonomi) keluarga menjadi nyata bagi kaum perempuan yang hidup, tumbuh dan berkembang pada kalangan masyarakat modern. Kaum perempuan sebagai kepala keluarga atau orang tua tunggal (single Tanpa kepemilikan kemampuan untuk memainkan peran ganda terlebih bagi kalangan kaum perempuan sebagai kepala keluarga atau orang tua tunggal (single parent) atau janda akan mengalami hambatan dan memenuhi berbagai bentuk kesulitan dalam menjalankan kehidupan sosial ekonomi apabila tidak mendapat pemberdayaan.

Permasalahan kemampuan perempuan dalam menjalankan kehidupan sosial ekonomi perlu untuk mendapatkan peningkatan kapasitas. Perempuan miskin untuk mendapatkan Program Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi harus memenuhi syarat-syarat. Peserta Program Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yakni perempuan dewasa berusia 18-59 tahun, belum menikah atau sudah menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (Keputusan Menteri Sosial Nomor. 24/HUK/1996). Rendahnya kualitas sumberdaya perempuan khususnya pada perempuan rawan sosial ekonomi sebagai faktor determinan dari rendahnya tingkat kesejahteraan sosial keluarga, dan merupakan salah satu dampak dari marginalisasi perempuan yang terjadi dari waktu ke waktu. Kondisi ini tercermin dari masih terbatasnya kemampuan dalam memahami, menganalisis dan memanfaatkan setiap bentuk peluang untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. PRSE membutuhkan pemberdayaan agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Pemberdayaan PRSE sudah dilakukan melalui beberapa program baik oleh pemerintah maupun swasta.

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan fokus masalah Penghasilan PRSE tidak mencukupi kebutuhan sehari hari keluarga. membutuhkan kegiatan pemberdayaan untuk mereka dapat memiliki keterampilan yang nantinya dapat menjadi sumber mata pencaharian tambahan bagi keluarga. Kebutuhan akan

pelatihan keterampilan ini dapat diwujudkan dalam berbagai program pelatihan seperti, pelatihan menjahit dan pemberian mesin jahit kepada PRSE tersebut.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Berikut beberapa sistem sumber formal dan kemasyarakatan yang terdapat di Desa Cingcin

1. Dinas Sosial Kabupaten Bandung

Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan rencana intervensi bisa bertindak sebagai pelindung dan juga edukator terhadap PRSE.

2. Bidang Kesejahteraan Masyarakat Desa Cingcin

Kasie bidang kesejahteraan masyarakat di Desa Cingcin bisa berperan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan program dan mengajak para PRSE untuk aktif dalam kegiatan yang akan dilaksanakan.

3. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat seperti ketua RT/RW bisa menjadi pendorong bagi warganya yang tergolong dalam PRSE untuk mau terlibat dalam program yang akan dilaksanakan.

2.3.4 Rencana Intervensi

Rencana intervensi adalah rencana tindak atau kegiatan pelayanan yang akan dilakukan oleh klien atas dasar asesmen. Berdasarkan hasil asesmen dan analisis masalah, adapun rencana intervensi yang dibuat oleh praktikan adalah sebagai berikut:

a. Latar Belakang

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002). Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1, ayat (8)). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan

kemampuan dan kemandirian masyarakat. Berdasarkan hasil asesmen menggunakan data primer dan sekunder melalui wawancara dengan kasi kesra desa Cingcin yaitu bapak Aditya Pamungkas pengusulan program pelatihan menjahit dapat menjadi rencana solusi yang akan dilaksanakan. Kriteria sasaran program tersebut adalah PRSE dengan kondisi perekonomiannya serba pas – pasan. Nantinya dalam pengkoordinasian langsung dengan PRSE dibantu oleh anggota PKK yang ada di masing – masing RW di desa Cingcin.

b. Tujuan umum dan khusus

1) Tujuan umum

Memberikan pelatihan keterampilan menjahit untuk PRSE mereka memiliki mata pencaharian yang dapat meningkatkan penghasilan keluarga.

2) Tujuan khusus

- a) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b) Menurunkan angka PRSE di desa Cingcin

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam melakukan tindak lanjut terhadap tingginya jumlah PRSE di desa Cingcin, yaitu berjudul “Pelatihan menjahit bersama PRSE di desa Cingcin” kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan menjahit bagi PRSE yang memerlukan kegiatan pemberdayaan.

d. Sistem Partisipan

Tabel 2. 9 Sistem Partisipan Analis Pemberdayaan Sosial

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	Inisiator sistem	Pekerja sosial
2.	Change a agent sistem	Pekerja sosial
3.	Client sistem	PRSE di desa Cingcin
4.	SupoRT sistem	1. Pekerja sosial 2. Kepala kelurahan 3. PKK desa Cingcin
5.	Controlling sistem	Desa cingcin
6.	Implementating sistem	1. pekerja sosial 2. PRSE
7.	Target sistem	PRSE
8.	Action sistem	Pekerja sosial

e. Metode dan Teknik

Metode yang akan digunakan adalah Community Organization and Community Development (COCD) yaitu pengembangan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.

Dalam program ini dilakukan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh PRSE padahal mereka masih mampu secara fisik dan mental untuk diberdayakan, agar nantinya dapat menambah penghasilan keluarga mereka. Kemudian *Foccus Group Disscusin* (FGD) dapat digunakan dalam rapat Musrenbang sebagai wadah diskusi mendengarkan usulan dari masyarakat. Capacity building dapat dilakukan dalam mengorganisasikan akar permasalahan, proses membantu individu atau kelompok untuk mengidentifikasi dan menemukan permasalahan dan menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan melakukan perubahan. Dalam hal ini capacity building dilakukan dengan pelatihan menjahit.

f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang dibutuhkan

- 1) Alat
Alat tulis, laptop, LCD dan Proyektor
- 2) Rencana Anggaran Biaya

No	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah
Konsumsi				
1.	Snack peserta	30box	5000	150.000
2.	Snack panitia	8box	5000	40.0000
3.	Snack tamu undangan	4box	5000	20.000
	Total			210.000
Logistik				
1.	Atk	1 paket	300.000	300.000
	Total			300.000
	Jumlah			510.000

Tabel 2. 10 RAB Analisis Pemberdayaan Sosial

f. Analisis kelayakan program SWOT

Tabel 2. 11 Analisis SWOT Analisis Pemberdayaan Sosial

FI F.eks	Strenght - Adanya dukungan dari pihak desa Cingcin - Adanya kerjasama bersama PKK desa Cingcin - Tersedianya lokasi dan peluang	Weakness PRSE di desa cingcin belum memiliki skil menjahit
Opportunity - Pekerja sosial mengerti kondisi ekonomi PRSE - Sarana prasarana di desa Cingcin memadai - Keterampilan pada PRSE di desa Cingcin masih bias di naikan	Strategi SO - Kolaborasi dengan pihak PKK untuk kegiatan menjahit - Tersedianya system sumber untuk pemberian materi dan pendanaan	Strategi WO - Pelaksanaan kegiatan berjalan efektif - Anggota PKK sebagai tim penggerak kegiatan pemberdayaan
Threat - PRSE menolak untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan - pihak PKK menolak untuk melakukan pendampingan karena tidak adanya waktu yang dimiliki	Strategi ST Melibatkan pihak dari desa untuk hadir pada acara rapat	Strategi WT Pada acara rapat dilakukan sesi diskusi yang bersifat demokrasi agar semua yang hadir dapat menyalurkan hak suaranya

Indikator Keberhasilan :

- 1) Peningkatan kondisi perekonomian bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mendapatkan pelatihan menjahit.
- 2) Kepuasan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) terhadap pelayanan yang diberikan oleh desa Cingcin.
- 3) Masyarakat memiliki perhatian yang lebih mengenai adanya Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di sekitar lingkungan mereka.

g. Jadwal dan Langkah langkah

1. Jadwal

Tabel 2. 12 Jadwal Analis Pemberdayaan Sosial

Program penyelesaian masalah	Tujuan	Sasaran	Penanggung jawab	Pelaksana	Jadwal kerja	Sumber biaya
Rapat bersama PRSE dan PKK yang diadakan di Desa Cingcin	Untuk mengajukan adanya program pemberdayaan untuk PRSE	Desa Cingcin	Pekerja sosial	Pekerja sosial	1 hari	Desa Cingcin
Pelatihan menjahit untuk PRSE	Memberikan pelatihan keterampilan menjahit untuk PRSE	PRSE desa cingcin	PKK	PRSE	25 Hari	Desa Cingcin
Monitoring dan Evaluasi	Melihat keadaan sosial ekonomi pada PRSE	PRSE	Pekerja sosial	PKK	1 Minggu	Desa Cingcin

2. Langkah langkah

Berikut adalah langkah-langkah kegiatan program yang dicantumkan pada tabel

Tabel 2. 13 Langkah-Langkah Analis Pemberdayaan Sosial

No	Nama Kegiatan	April				Mei	
		Pelaksanaan minggu ke				I	II
		I	II	III	IV		
1.	Pelaksanaan Rapat	V					
2.	Membentuk tim pelatihan menjait dari perwakilan PKK	V					
3.	Menentukan tugas dari masing masing anggota	V					
4.	Menyusun rencana kerja tim		V				
5.	Menyiapkan media dan sarana prasarana			V			
6.	Pelaksanaan kegiatan menjahit			V	V	V	
7.	Pendampingan pelatihan			V	V	V	
8.	Melakukan evaluasi program						V
9.	Menyusun lembar pertanggungawaban program oleh tim						V

2.4 Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial

Pada profil analisis Penataan Lingkungan Sosial, praktikan memilih isu mengenai pengaruh kebersihan lingkungan terhadap kasus stunting. Menggunakan metode wawancara, melakukan proses tanya jawab yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan dari pihak praktikan dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.

2.4.1 Gambaran Masalah

Permasalahan peningkatan angka stunting di suatu daerah disebabkan oleh berbagai faktor. Baik faktor penyebab yang berasal dari internal maupun eksternal. Faktor internal sendiri disebabkan oleh pola makan dan kesehatan dari orang tua dan kebutuhan gizi anak dan balita. Sedangkan faktor eksternal berhubungan dengan lingkungan sekitar anak dan balita tersebut baik itu lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Namun fakta yang terjadi di lapangan, banyak masyarakat yang tidak sadar terhadap pemicu stunting dari faktor eksternal ini yang mana berubungan dengan pola perilaku hidup bersih dan sehat anggota keluarga yang kurang baik.

Seperti halnya di Desa Cingcin, masih terdapat permasalahan angka stunting yang cukup signifikan. Salah satu penyebabnya berhubungan dengan pola perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakatnya yang kurang menerapkan secara maksimal. Terlihat masih banyak sampah berserakan dan penataan tempat pembuangan akhir yang belum efektif sehingga mengundang lalat dan menyebabkan lingkungan sekitarnya kumuh dan kotor. Terlebih masyarakat yang tinggal di sekitar gang-gang sempit yang mana akses pembuangan limbah, pembuangan sampah, dan jarak rumah yang berdekatan sehingga menyebabkan permasalahan lingkungan yang berpotensi pada penurunan kesehatan sehingga mampu menyebabkan peningkatan angka stunting di Desa Cingcin.

2.4.2 Tinjauan Konsep / Teori yang Relevan

a. Tinjauan Konsep Lingkungan Sosial

1) Definisi Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial adalah interaksi diantara masyarakat dengan lingkungannya, atau lingkungan yang terdiri dari makhluk sosial. Lingkungan sosial merupakan tempat berlangsungnya berbagai macam interaksi sosial yang terjalin antara berbagai kelompok dalam masyarakat yang didalamnya tertuang pranata, symbol dan juga nilai serta norma yang sudah terstruktur. Lingkungan sosial berkaitan erat dengan lingkungan alam dan lingkungan buatan yang berada di kehidupan masyarakat.

Stroz (1987) menyatakan bahwa lingkungan sosial merupakan kondisi di sekitar kehidupan dimana terdapat cara cara tertentu yang dapat mempengaruhi tingkah laku individu, termasuk pertumbuhan dan

perkembangan pada proses kehidupan, serta dapat pula dipandang sebagai bekal persiapan lingkungan bagi generasi yang selanjutnya atau penerus.

Maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial merupakan hubungan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya. Hubungan ini dapat digambarkan sebagai hubungan timbal balik.

2) Jenis Lingkungan Sosial

Terdapat dua jenis lingkungan sosial, yaitu lingkungan sosial primer merupakan lingkungan sosial yang didalamnya terdapat interaksi atau hubungan yang terjalin secara erat antara satu dengan yang lainnya. Hubungan ini bersifat berkesinambungan dan merupakan suatu sistem. Lingkungan ini ditandai dengan adanya kerja sama, pertemuan yang intens dan terdapat struktur yang mendasar.

Jenis lingkungan sosial yang kedua yaitu lingkungan sosial sekunder merupakan lingkungan sosial yang didalamnya terdapat hubungan yang hanya berorientasi pada kepentingan tertentu ataupun aktivitas khusus dalam kehidupan masyarakat.

3) Faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Sosial

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan sosial seperti pengelompokan sosial merupakan ruang lingkup yang diciptakan oleh masyarakat sesuai dengan kekhasan yang dimiliki masing masing kelompok. Ruang lingkup ini mencakup berbagai macam individu yang bergabung menjadi suatu kelompok dalam suatu persekutuan atau pengelompokan sosial yang dilandasi hubungan kekerabatan, pekerjaan, atau hal hal yang dianggap sama.

Penataan sosial dapat berwujud aturan aturan dalam masyarakat yang sudah disepakati bersama. Penataan sosial berfungsi sebagai pengatur ketertiban hidup dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan pedoman dalam berinteraksi di lingkungan. Dalam hal ini masyarakat dapat memahami peran peran yang harus dilakukan dan didapatkan dari lingkungan. Kebutuhan sosial, setiap makhluk hidup memiliki kebutuhan yang berbeda, kemudian kebutuhan tersebut juga tidak dapat dipenuhi oleh individu, maka masyarakat membutuhkan masyarakat lainnya untuk saling memenuhi kebutuhannya.

b. Tinjauan Konsep tentang Stunting

1. Definisi Stunting

Balita pendek (Stunting) adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting dapat terjadi mulai janin dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. (Eko Putro sandjojo, 2017). Stunting adalah status gizi yang didasarkan pada indeks PB / U atau TB / U dimana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak, hasil pengukuran tersebut ada pada ambang batas ($Z - \text{Score}$) $< 2 \text{ SD}$ sampai dengan $- 3 \text{ SD}$ (pendek / stunted) dan $< -3 \text{ SD}$ (sangat pendek/ severely stunted) (Trihono, dkk, 2015).

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan fisik yang ditandai dengan penurunan kecepatan pertumbuhan dan merupakan dampak dari ketidakseimbangan gizi.

Menurut WHO (2015), stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Menurut World Health Organization (WHO) Child Growth Standard, stunting didasarkan pada indeks panjang badan dibanding umur (PB/U) atau tinggi badan dibanding umur (TB/U) dengan batas (z-score) kurang dari -2 SD.

2. Penyebab Stunting

a. Faktor Internal

1. Faktor Ibu

Faktor ibu dapat dikarenakan nutrisi yang buruk selama prekonsepsi, kehamilan, dan laktasi. Selain itu juga dipengaruhi perawakan ibu seperti usia ibu terlalu muda atau terlalu tua, pendek, infeksi, kehamilan muda, kesehatan jiwa, BBLR, IUGR dan persalinan prematur, jarak persalinan yang dekat dan hipertensi (Sandra Fikawati dkk, 2017).

2. Faktor Genetik

Faktor genetik merupakan modal dasar mencapai hasil proses pertumbuhan. Melalui genetik yang berada dalam sel telur yang telah dibuahi, dapat ditentukan kualitas dan kuantitas pertumbuhan. Derajat sensitivitas jaringan terhadap rangsangan, umur pubertas dan berhentinya pertumbuhan tulang (Narsikhah, 2012). Menurut Amigo et al, dalam Narsikhah (2012) salah satu atau kedua orang tua yang pendek akibat kondisi patologi (seperti defisiensi hormon pertumbuhan) memiliki gen dalam kromosom yang membawa sifat pendek sehingga memperbesar peluang anak mewarisi gen tersebut dan tumbuh menjadi stunting. Akan tetapi, bila orang tua pendek akibat kekurangan zat gizi atau penyakit, kemungkinan anak dapat tumbuh dengan tinggi badan normal selama anak tersebut tidak terpapar faktor resiko yang lain.

3. Asupan Makan

Kualitas makanan yang buruk meliputi kualitas micronutrien yang buruk, kurangnya keragaman dan asupan pangan yang bersumber dari pangan hewani, kandungan tidak bergizi, dan rendahnya kandungan energi pada complementary foods.

4. Pemberian ASI Eksklusif

Masalah-masalah terkait praktik pemberian ASI meliputi delayed Initiation, tidak menerapkan ASI Eksklusif, dan penghentian dini konsumsi ASI. Sebuah penelitian membuktikan bahwa menunda inisiasi menyusui (delayed initiation) akan meningkatkan kematian bayi. ASI Eksklusif adalah pemberian ASI tanpa suplementasi

makanan maupun minuman lain, baik berupa air putih, jus, ataupun susu selain ASI.

5. Infeksi Penyakit

Beberapa contoh infeksi yang sering dialami yaitu infeksi entrik seperti diare, enteropati, dan cacing, dapat juga disebabkan oleh infeksi pernapasan (ISPA), malaria, berkurangnya nafsu makan akibat serangan infeksi dan inflamasi.

b. Faktor Eksternal

1. Faktor Sosial Ekonomi

Status ekonomi yang rendah dianggap memiliki dampak yang signifikan terhadap anak menjadi kurus dan pendek (UNICEF, 2013). Menurut Bishwakarma dalam Khoiron dkk (2015), status ekonomi yang rendah akan mempengaruhi pemilihan makanan yang dikonsumsi sehingga biasanya menjadi kurang bervariasi dan sedikit jumlahnya terutama pada bahan pangan yang berfungsi untuk pertumbuhan anak seperti sumber protein, vitamin dan mineral sehingga meningkatkan resiko kekurangan gizi.

2. Tingkat Pendidikan

Menurut Delmi Sulastri (2012), pendidikan ibu yang rendah dapat mempengaruhi pola asuh dan perawatan anak. Selain itu juga berpengaruh dalam pemilihan dan cara penyajian makanan yang akan dikonsumsi oleh anaknya. Penyediaan bahan dan menu makan yang tepat untuk balita dalam upaya peningkatan status gizi akan dapat terwujud bila ibu mempunyai tingkat pengetahuan gizi yang baik. Ibu dengan pendidikan rendah antara lain akan sulit menyerap informasi gizi sehingga anak dapat beresiko mengalami stunting.

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan rumah, dapat dikarenakan oleh stimulasi dan aktivitas yang tidak adekuat, penerapan asuhan yang buruk, ketidakamanan pangan, alokasi pangan yang tidak tepat, rendahnya edukasi pengasuh. Anak-anak yang berasal dari rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas air dan sanitasi yang baik beresiko mengalami stunting (Putri dan Sukandar, 2012).

3. Dampak Stunting

1. Gangguan Kognitif

Anak dengan stunting memiliki kemampuan kognitif yang lebih buruk. Stunting sering dikaitkan dengan penurunan IQ pada usia sekolah. Hal ini membuktikan bahwa stunting juga dapat memengaruhi perkembangan otak anak, selain perkembangan fisiknya.

2. Kesulitan Belajar

Tingkat fokus anak juga dapat terpengaruh karena mengidap stunting. Pasalnya, anak-anak yang stunting akan mengalami kesulitan berkonsentrasi, yang membuat mereka kesulitan

belajar.

Selain itu, penelitian telah menunjukkan bahwa anak-anak dengan perawakan pendek akibat stunting memiliki tingkat fokus dan konsentrasi yang lebih rendah. Ini kemudian akan mengganggu kinerja akademis mereka.

3. Imunitas Lebih Rendah

Kekebalan yang menurun terkait dengan malnutrisi yang terjadi pada stunting. Asupan gizi yang kurang dapat menyebabkan gangguan pada sistem kekebalan tubuh secara keseluruhan, sehingga membuat anak lebih rentan terhadap mengidap penyakit berulang yang sama.

Kondisi ini akan berada dalam siklus yang berulang jika tidak segera mendapatkan penanganan. Artinya, penyakit yang berulang akan mengakibatkan asupan gizi yang buruk dan akan terus mempengaruhi daya tahan tubuh anak.

4. Hilangnya Produktivitas

Saat anak beranjak dewasa, stunting juga dapat memengaruhi produktivitas dan kinerja di tempat kerja. Orang dewasa dengan riwayat stunting terbukti kurang produktif di tempat kerja, yang pada akhirnya memengaruhi pendapatan mereka.

Hal ini tidak terjadi pada sekelompok orang dewasa yang tidak mengidap stunting saat masih anak-anak. Konsekuensi dari stunting bisa sangat serius bagi anak-anak. Tentu, orang tua harus memperhatikan kondisi ini.

c. Tinjauan Konsep Tentang PHBS

1. Definisi PHBS

PHBS merupakan kependekan dari Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Sedangkan pengertian PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok ataupun masyarakat luas dengan jalur – jalur komunikasi sebagai media berbagi informasi.

2. Tujuan PHBS

Tujuan utama dari gerakan PHBS adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu – individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari – hari yang bersih dan sehat. Manfaat PHBS yang paling utama adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan.

2.4.3 Assesmen

Assesmen merupakan tahap pengumpulan dan analisis data untuk memahami masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima layanan. Dalam hal ini praktikan, menggunakan metode wawancara. Dalam menerapkan metode wawancara praktikan menggunakan teknik analisis data, seperti teknik analisis pohon masalah.

a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua RW 20 dan ketua RT 01 desa Cingcin terdapat beberapa permasalahan terkait kebersihan lingkungan yang ada di desa Cingcin, yaitu :

1. Banyaknya warga yang belum melaksanakan PHBS

Hal ini berdasarkan survei langsung pada RW 20 desa Cingcin yang mana pada selokan dekat rumah penduduk terdapat tumpukan limbah dapur yang sangat mengganggu lingkungan. Hal ini merupakan salah satu perilaku yang tidak mencerminkan PHBS.

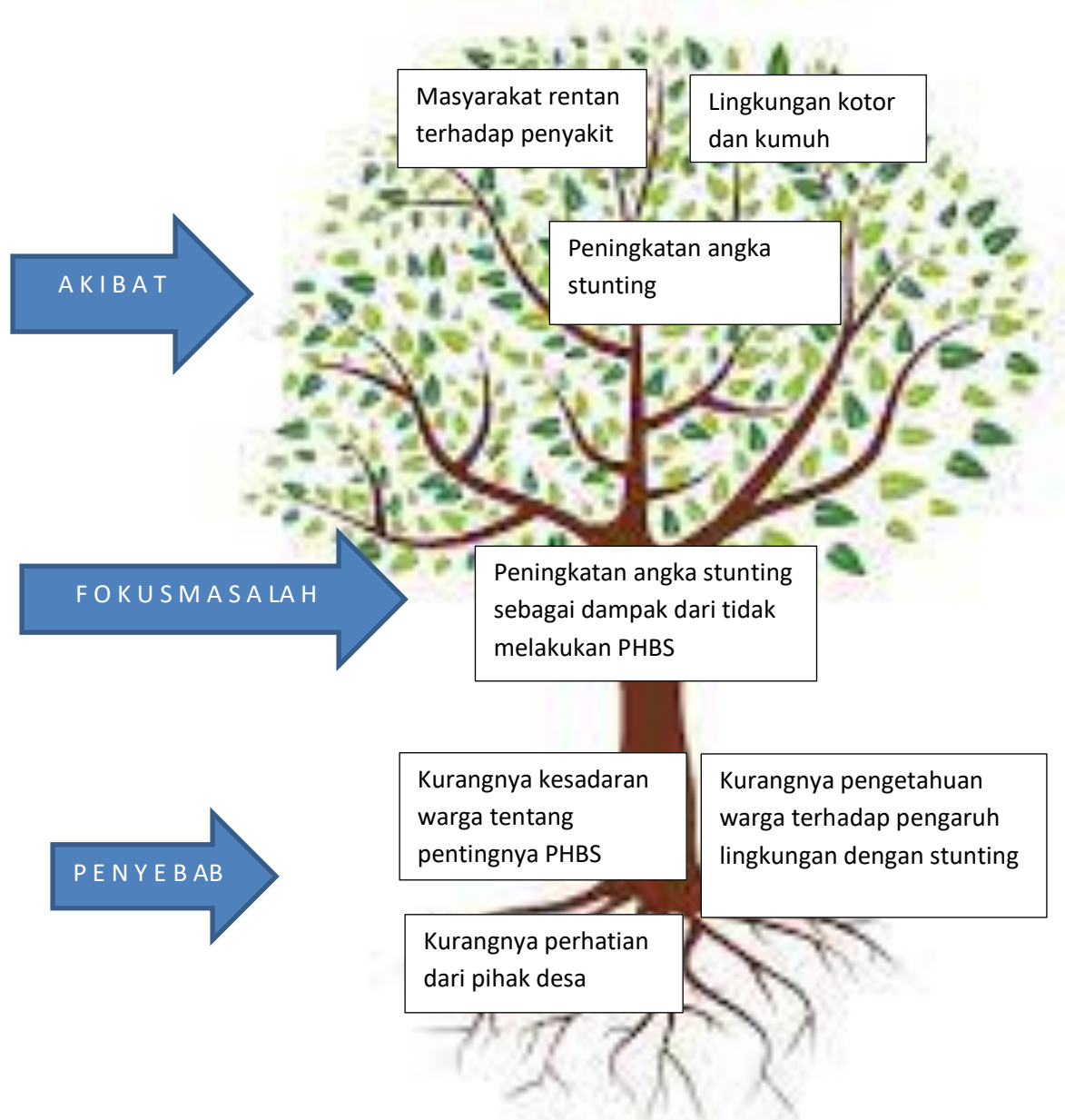
2. Sistem Sanitasi Lingkungan di sebagian wilayah kurang baik

Sanitasi yang buruk menyebabkan permasalahan kesehatan yang berdampak pada terjadinya stunting. Karena sanitasi lingkungan berhubungan dengan kebersihan lingkungan sekitar, fakta di lapangan dilihat masyarakat banyak yang belum maksimal dalam sanitasi lingkungan.

3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang PHBS dan Dampak Stunting

Masyarakat desa cingcin belum mengetahui bahwa pentingnya pengetahuan PHBS berhubungan erat dengan kasus stunting. Sehingga banyak masyarakat yang masih belum sadar akan hal ini dan tidak menerapkan PHBS.

Dalam mengidentifikasi masalah praktikan menggunakan teknik Analisis Pohon Masalah, Analisa masalah mengenai isu, pengaruh kebersihan lingkungan terhadap kasus stunting. Pohon masalah dapat membantu untuk menganalisa permasalahan yang terjadi sehingga dapat mengetahui sebab akibat dan solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Batang pohon menggambarkan isu atau masalah yang sedang terjadi, sedangkan ranting pohon menggambarkan akibat dari sebab yang diilustrasikan oleh akar pohon.



Gambar 6 Pohon Masalah Analis Penataan Lingkungan

1) Penyebab Masalah

a. Kurangnya kesadaran warga tentang pentingnya PHBS

PHBS merupakan suatu upaya yang harus diterapkan untuk menanamkan kesadaran warga dalam upaya pola perilaku hidup bersih dan sehat yang salah satu tujuannya untuk mencegah terjadinya stunting. Namun di lapangan, masih banyak masyarakat yang menyepelekan terkait penerapan PHBS dalam kehidupan sehari-hari, contohnya mereka masih membuang limbah sembarangan yang menyebabkan lingkungan kotor.

b. Kurangnya pengetahuan warga tentang hubungan kebersihan lingkungan dengan stunting

Banyaknya warga yang tidak mengetahui bahwa faktor lingkungan sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat yang secara tidak langsung bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya stunting.

c. Kurangnya perhatian dari pihak desa

Menurut beberapa warga RT 01 pihak desa belum maksimal dalam menggalakkan sosialisasi terkait pencegahan stunting kepada warga. Bahkan dalam kegiatan posyandu pun masih kurang maksimal dalam usaha meminimalisir stunting, salah satunya pemberian PMT yang kurang variatif.



Gambar 7 Observasi Lapangan

2) Dampak Masalah

a. Masyarakat rentan terhadap penyakit

Minimnya penerapan PHBS menyebabkan permasalahan lingkungan meningkat yang secara tidak disadari hal ini juga berdampak pada penurunan kesehatan masyarakat di sekitar wilayah tersebut.

b. Peningkatan angka stunting

Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak stunting yang diakibatkan dari kurangnya kesadaran terhadap kebersihan lingkungan.

c. Lingkungan kotor dan kumuh

Akibat kurangnya penerapan PHBS menyebabkan perilaku warga seperti membuang sampah sembarangan, seperti di selokan yang menyebabkan penumpukan sehingga lingkungan terlihat kotor dan kumuh. Terlebih pengelolaan tempat pembuangan sampah yang kurang optimal mampu mengganggu penataan lingkungan. Contohnya tumpukan limbah dapur ini dinilai sangat mengganggu pemandangan ketika kita melewati jalan di RW 20 desa Cingcin. Selain mengganggu pemandangan limbah dapur ini juga menyebabkan bau yang tidak sedap ketika kita melewatinya. Hal ini membuat tidak nyaman warga dan masyarakat lainnya yang tinggal atau berkunjung karena penumpukan limbah dapur ini terdapat pada selokan di pinggir jalan



Gambar 8 Penumpukan Sampah



Gambar 9 Sampah di Lapangan

3) Fokus Masalah

Kurangnya kesadaran dalam penerapan PHBS merupakan suatu pola perilaku yang kurang baik yang mampu meningkatkan angka terjadinya stunting bagi anak dan balita. Salah satunya dengan tidak memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar yang merupakan sumber utama yang sering berinteraksi dengan kita. Berdasarkan wawancara bersama ketua RT 01 RW 20 sebagian besar warga di RT 01 itu tidak memiliki tempat pembuangan limbah khususnya limbah dapur sehingga mereka membuang limbah dapur pada selokan yang berada di tepi jalan, selain itu tempat pembuangan akhir pun kurang efektif dalam pengelolaannya. Sehingga hal ini menyebabkan peningkatan angka stunting di Desa Cingcin. Maka praktikan mengambil fokus masalah yaitu k Peningkatan angka stunting sebagai dampak dari tidak melakukan PHBS.

b. Identifikasi kebutuhan

Berdasarkan fokus masalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap upaya PHBS sehingga menyebabkan peningkatan angka stunting di desa Cingcin tepatnya pada RT 01 RW 20 membutuhkan penyuluhan mengenai peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya PHBS dalam pencegahan stunting.

b. Identifikasi Potensi dan Sumber

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan dukungan pihak pihak terkait yang dapat diakses. Maka dari itu, praktikan melakukan analisis sistem sumber analisis hubungan antar kelembagaan yaitu :

1) Ketua RW

Ketua RW memiliki kedekatan yang erat karena merupakan wilayah kekuasaan Ketua RW. Ketua RW memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat.

2) Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat, disingkat Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Puskesmas memiliki kedekatan yang tidak terlalu dekat namun memiliki pengaruh terhadap masyarakat.

3) Dinas Kesehatan

Salah satu tugas dari Dinas Kesehatan adalah Perumusan kebijakan operasional dan rencana program di bidang kesehatan masyarakat, hal tersebut dapat dimanfaatkan dalam sosialisasi bahaya membuang limbah dapur pada selokan.

4) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hubungan yang dekat dengan masyarakat dan pengaruh yang cukup besar, terlebih dalam hal motivator bagi masyarakat yang menjadi target sasaran.

2.4.4 Rencana Intervensi

Rencana intervensi adalah rencana tindak atau kegiatan pelayanan yang akan dilakukan oleh klien atas dasar asesmen. Berdasarkan hasil asesmen dan analisis masalah, adapun rencana intervensi yang dibuat oleh praktikan adalah sebagai berikut :

a. Latar Belakang

Lingkungan sosial merupakan interaksi antara masyarakat dengan lingkungan, atau lingkungan yang terdiri dari makhluk sosial atau manusia. Pada lingkungan sosial tidak terlepas dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu lingkungan sosial memiliki keterkaitan satu sama lain dengan lingkungan alam (ekosistem) serta lingkungan buatan atau tata ruang di sekitar. Maka dari itulah nilai dan norma di masyarakat sangat diperlukan untuk menata ekosistem dan lingkungan buatan agar dapat terjaga dengan baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik lagi atau dapat pula mempersiapkan kehidupan di masa mendatang. Limbah dapur adalah limbah yang berasal dari sisa bahan makanan tidak akan diolah. Ada dua jenis limbah yaitu Limbah basah dan

limbah kering. Limbah basah adalah limbah yang mudah membusuk seperti kulit pepaya, kulit semangka, kulit pisang dan lain-lain, Limbah tersebut dapat diolah berbagai produk makanan.

Berdasarkan hasil assesmen yang praktikan dapatkan sebagian besar warga di RT 01 RW 20 belum banyak yang sadar akan penerapan PHBS dalam upaya menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, sehingga hal ini berpengaruh pada standar kesehatan disana salah satunya peningkatan angka stunting akibat ketidaksadaran masyarakat ini.

b. Tujuan umum dan khusus

1) Tujuan umum

Meningkatkan kesadaran masyarakat di Desa Cingcin akan pentingnya penerapan PHBS dalam upaya pencegahan stunting di Desa Cingcin.

2) Tujuan khusus

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan limbah dapur
2. Membuat penyuluhan pelatihan mengenai pengolahan limbah dapur

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan peningkatan angka stunting akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam PHBS, yaitu berupa sosialisasi dan edukasi yang mengusung program “Masyarakat Sadar PHBS, Cegah Stunting”. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat dan Pemerintah Desa untuk bersama-sama meningkatkan pemahaman mengenai urgensi PHBS dan bahaya stunting. Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Sosialisasi mengenai urgensi PHBS dalam upaya pencegahan stunting.
2. Pelatihan pengolahan lingkungan yang baik.

d. Sistem Partisipan

Tabel 2. 14 Sistem Partisipan Analisis Penataan Lingkungan

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	Inisiator system	Pekerja sosial
2.	Change agen system	1. Pekerja sosial 2. Puskesmas
3.	Client system	Warga desa cingcin RW 20
4.	SuppoRT system	1. Pihak Desa 2. Pekerja sosial 3. Ketua rw
5.	Controlling sistem	Desa cingcin
6.	Implementating sistem	Pekerja sosial
7.	Target system	Warga desa cingcin RW 20
8.	Action system	1. Pekerja sosial 2. Puskesmas

e. Metode dan Teknik

Metode yang digunakan dalam praktikum ini adalah *Community Organization and Community Development (COCD)* dengan model *Social Planning*. Metode ini digunakan dalam kegiatan penyuluhan urgensi penerapan PHBS di lingkungan sekitar dan pelatihan pengelolaan lingkungan. Sebelumnya dilakukan pengumpulan data fakta, menganalisis data dan bekerja sebagai perancang program. Perencanaan dilakukan dengan sadar dan rasional, dan dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan-pengawasan yang ketat untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi.

Teknik yang digunakan dalam pelaksanaan program ini adalah dengan penyuluhan sosial. Penyuluhan sosial adalah memberikan penerangan tentang segala sesuatu yang belum diketahui dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyuluhan ini diberikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya stunting dan pentingnya PHBS.

f. Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

1. Alat
LCD, Layar, Ruang Pertemuan, Kursi, Alat Tulis dan Laptop
2. Rencana Anggaran Biaya
Rencana Anggaran Biaya Program “Masyarakat Sadar PHBS, Cegah Stunting”

Tabel 2. 15 RAB Analis Penataan Lingkungan

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Logistik				
	a. ATK	1	Pack	300.000	300.000
	b. Spanduk	1	Buah	150.000	150.000
	c. Banner	1	Buah	100.000	100.000
	d. Undangan	35	Lembar	500	17.500
2.	Honorisum				
	a. Pihak Puskesmas	3	orang	300.000	900.000
	b. Pekerja sosial	2	orang	200.000	400.000
3.	Konsumsi				
	a. Snack Peserta	30	box	10.000	300.000
	b. Snack Panitia	7	box	10.000	70.000
	c. Snack Narasumber	3	box	10.000	30.000
4.	Transportasi				
	Narasumber	3	orang	200.000	600.000
	TOTAL				2.867.500

g. Analisis kelayakan program

Tabel 2. 16 Analisis SWOT Analisis Penataan Lingkungan

F. I F.Eks	Strenght 1. Adanya pelatihan yang mampu meningkatkan kapasitas partisipan 2. Memiliki indikator keberhasilan yang jelas 3. Melibatkan partisipasi masyarakat langsung dalam FGD	Weakness Kehadiran warga yang tidak menyeluruh dalam kegiatan
Opportunity 1. Pihak puskesmas di desa soreang mau bekerjasama untuk memberikan materi penyuluhan 2. Penyuluhan sangat bermanfaat bagi masyarakat 3. Sarana prasarana dari desa memadai 4. Dukungan dari berbagai pihak	Strategi SO 1. Keterlibatan ketua RW pada proses penyuluhan 2. Pihak puskesmas sebagai narasumber	Strategi WO 1. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari efektif 2. Ketua RW menjadi penggerak
Threat Adanya penolakan dari warga untuk mengikuti penyuluhan	Strategi ST Melibatkan seluruh pengurus dan warga untuk hadir pada penyuluhan	Strategi WT Pada saat penyuluhan diadakan sesi diskusi yang bersifat demokrasi agar semua yang hadir dapat menggunakan hak suara nya

Indikator Keberhasilan :

- 1) Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai urgensi penerapan PHBS dalam upaya penurunan angka stunting
- 2) Berkurangnya perilaku pola hidup yang tidak sehat dan merusak lingkungan
- 3) Masyarakat mengetahui dan bisa sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan lingkungan sekitar

h. Jadwal dan langkah langkah

1) Jadwal

Tabel 2. 17 Jadwal Analisis Penatan Lingkungan

Program Penyelesaian Masalah	Tujuan	Sasaran	Penanggung Jawab Pelaksanaan	Pelaksana	Jadwal Kerja	Sumber Biaya
Penyuluhan bahaya stunting dan pentingnya penerapan PHBS	Untuk meningkatkan pemahaman mengenai bahaya stunting pada anak dan balita, serta menanamkan kepekaan masyarakat akan kebersihan lingkungan dan penerapan PHBS.	Warga desa cingcin RW 20	Pekerja sosial	Pihak puskesmas dan pekerja sosial	1 hari	Desa cingcin
Focus Group Discussion	Membahas permasalahan dan di berikan materi pencegahan stunting serta praktik PHBS.	Warga desa cingcin RW 20	Pekerja sosial	Pekerja sosial	1 hari	Desa cingcin
Monitoring dan evaluasi	Melihat perubahan pada masyarakat	Warga desa cingcin RW 20	Pihak desa	Pekerja sosia;	2 minggu	Desa cingcin

2) Langkah langkah

a) Pra Pelaksanaan

1. Identifikasi sasaran kegiatan
Praktikan mengidentifikasi sasaran kegiatan penyuluhan pencegahan stunting dan praktik penerapan PHBS.
2. Identifikasi Stakeholder
Stakeholder dapat diartikan sebagai pemangku kepentingan, dalam hal ini praktikan mengidentifikasikan stakeholder yang akan terlibat dalam pelaksanaan penyuluhan yaitu RT,RW, Pihak Desa dan Puskesmas.
3. Penyiapan Materi
Materi yang akan disampaikan adalah :
 - 1) Bahaya stunting dan urgensi PHBS
 - 2) Strategi penerapan PHBS dalam kehidupan.
4. Penetaan Narasumber
Narasumber dalam Kegiatan Penyuluhan bahaya stunting dan urgensi PHBS adalah Pihak Puskesmas dan Pekerja sosial
5. Penyiapan Lokasi Kegiatan
Kegiatan Penyuluhan akan dilaksanakan di Aula desa Cingcin

b) Pelaksanaan

Kegiatan Penyuluhan bahaya stunting dan urgensi PHBS dilakukan dalam satu hari dengan dua sesi. Sesi pertama memberikan penyuluhan mengenai bahaya stunting pada anak dan balita. Kemudian pada sesi dua membahas mengenai urgensi PHBS dalam lingkungan sekitar.

Tabel 2. 18 Rundown Acara Analis Penataan Lingkungan

No	Hari	Jam	Kegiatan	Pengisi acara
1.	9 April 2023	10.00-10.10	Pembukaan	MC
2.		10.10-10.20	Sambutan	Kepala Desa
3.		10.20-11.00	Pemaparan Materi	Pihak puskesmas
4.		11.00-11.20	Sesi tanya jawab	Mc
5.		11.20-11.30	Kesimpulan	MC
6.		11.30-12.10	ISHOMA	
7.		12.10-12.50	Pemaparan materi	Dinas lingkungan hidup
8.		12.50-13.00	Sesi tanya jawab	MC
9.		13.00-13.10	Simpulan	MC
10.		13.10-13.20	Dokumentasi	Seluruh hadirin
11.		13.20-13.30	Penutup	MC

c) Pasca Pelaksanaan

- 1) Monitoring kepada warga desa cingcin RW 20 yang akan dilaksanakan oleh Pihak Ketua RW.
- 2) Menyusun Laporan

2.5 Profil Analis Penanggulangan Bencana

Pada profil analisis Penataan Pemberdayan Sosial, praktikan memilih isu mengenai kurang kesiapsiagaan masyarakat desa Cingcin dalam menghadapi cuaca ekstrim. Dalam menyusun laporan praktikan menggunakan metode wawancara, melakukan proses tanya jawab yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan dari pihak praktikan dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.

2.5.1 Gambaran Umum masalah

Tren pemanasan global yang semakin meningkat, bencana alam yang sering terjadi membawa tantangan yang serius bagi pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, peristiwa bencana alam sangat sering terjadi baik yang disebabkan oleh peristiwa geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami, maupun kejadian bencana yang disebabkan oleh klimatologi dan hidrometeorologi. Berdasarkan data World risk repoRT 2018, Indonesia menduduki urutan ke-36 dengan indeks risiko 10,36 dari 172 negara paling rawan bencana alam di dunia (Hadi, 2019: 30).

Salah satu dari bencana yang terjadi di Indonesia adalah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim yang terjadi dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi. Cuaca ekstrim adalah informasi cuaca dan iklim yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya fenomena alam yang tidak lazim terjadi atau biasa. Dampak kondisi penyimpangan iklim (cuaca ekstrim) yang nyata adalah meningkatnya intensitas curah hujan, banjir bandang dan banjir pasang, badai lokal, suhu perkotaan naik, kekeringan dan tanah longsor. Kerugian akibat cuaca ekstrim dapat mencakup kedua jenis; kerugian moneter (kerusakan bangunan dan property lain yang dapat diperbaiki atau diganti), serta dampak non-moneter seperti hilangnya nyawa, dampak kesehatan, dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan seperti erosi pantai, dampak ekosistem dan dampak sosial

Indonesia merupakan wilayah yang rentan terhadap terjadinya bencana salah satunya cuaca ekstrem. Cuaca ekstrem merupakan suatu kondisi cuaca atau iklim yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu yang tidak biasa dan juga sangat jarang terjadi, khususnya fenomena cuaca atau iklim yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia.

Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera yang memiliki system cuaca dan iklim dengan pergiliran yang teratur antara musim hujan

dan musim kemarau, jika terjadi penyimpangan iklim, maka terjadi aktivitas cuaca ekstrem. Saat ini, penyimpangan cuaca dan iklim telah mengakibatkan cuaca ekstrem di sebagian besar wilayah Indonesia yang memicu sejumlah bencana alam, seperti angin puting beliung, dan banjir yang terjadi di berbagai daerah. Berdasarkan berita yang dikeluarkan BMKG, kejadian fenomena cuaca ekstrem menjadi sangat sering sejak 30 tahun terakhir. Kejadian cuaca ekstrem tersebut terjadi di beberapa provinsi besar di Indonesia diantaranya adalah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua Barat dan Papua.

Faktor pertama penyebab terjadinya cuaca ekstrem adalah karena aktifnya Monsun Asia dimana adanya angin yang berhembus secara periodik dari Benua Asia menuju Benua Australia yang melewati Indonesia. Indonesia yang berada di garis khatulistiwa yang berdampak oleh pergerakan angin ini. Angin periodik tersebut mengindikasikan musim hujan di Indonesia yang sedang berlangsung. Apabila cuaca ekstrem sedang berlangsung di Indonesia, pola konvergensi dan perlambatan kecepatan angin akan terjadi di beberapa wilayah, oleh karena itu uap air yang menjadi awan hujan akan terkonsentrasi di suatu wilayah sehingga air yang turun intensitasnya tinggi. Hujan lebat dan dalam waktu lama dapat terjadi akibat konvergensi dan perlambatan tersebut. Faktor yang terakhir yaitu suhu hangat permukaan laut di Indonesia dan sekitarnya yang memicu mudahnya air menguap dan terkumpul menjadi awan hujan yang menyebabkan pasokan uap air cukup tinggi yang mengakibatkan pembentukan awan hujan dan fenomena gelombang atmosfer. Gelombang atmosfer dapat meningkatkan potensi udara basah di sejumlah wilayah di Indonesia yang menyebabkan hujan.

Fenomena yang dapat terjadi karena adanya cuaca ekstrim di Indonesia adalah hujan lebat yang disertai dengan petir dan angin kencang atau yang sering disebut badai guruh. Hujan lebat berpotensi menimbulkan banjir dan longsor dan puting beliung. Kejadian cuaca ekstrem pada musim penghujan yang paling banyak adalah angin puting Beliung.

Di desa Cingcin pada sendiri cuaca ekstrime ini sering berafiliasi dengan eksistensi siklon (badai) tropis dan efek anomaly iklim, baik El Nino atau La Nina sehingga di desa cingcing sering terjadi hujan yang lebat sampai beberapa hari dan pada hari berikutnya terjadi panas hingga beberapa hari kedepannya, sehingga dari kejadian tersebut banyak sekali warga desa cingcing yang mengalami sakit seperti demam, batuk, pilek dsb. Namun masih banyak warga desa cingcin yang belum tau dan mengerti cara mengantisipasi atau mencegah agar mereka tidak sakit akibat adanya cuaca ekstrime, bahkan banyak juga warga yang tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah cuaca ekstrime mereka hanya berfikir bahwa itu adalah hal yang biasa saja.

2.5.2 Tinjauan Konsep/Teori yang Relevan

a. Bencana Alam

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, UU No 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, nonalam, dan sosial.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain cuaca berupa gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrim, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana alam bisa terjadi karena faktor alam itu sendiri maupun karena ulah manusia. Bencana alam karena faktor alam terjadi murni karena berbagai proses yang terjadi di alam tanpa sedikitpun manusia terlibat di dalamnya. Kejadiannya merupakan peristiwa yang mengikuti hukum alam tertentu. Bencana alam karena gejala alam biasanya sulit untuk diperkirakan dan sulit pula untuk dihindari. Manusia sering tidak berdaya untuk menghentikannya karena kekuatannya di luar jangkauan kemampuan manusia, berdasarkan statistik mulai Tahun 2002 sampai Tahun 2010 wilayah Indonesia 83 % adalah wilayah rawan bencana. Manusia hanya berupaya mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan dengan memantau perkembangannya dan segera melakukan evakuasi ketika bencana terjadi. Datangnya bencana alam tidak dapat diprediksi secara mutlak, bencana alam merupakan konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami dan aktivitas manusia yang mereduksi lingkungan serta keberadaan di daerah titik rawan bencana alam.

b. Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim adalah informasi cuaca dan iklim yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya fenomena alam yang tidak lazim terjadi atau biasa. Dampak kondisi penyimpangan iklim (cuaca ekstrim) yang nyata adalah meningkatnya intensitas curah hujan, banjir bandang dan banjir pasang, badai lokal, suhu perkotaan naik, kekeringan dan tanah longsor. Kerugian akibat cuaca ekstrim dapat mencakup kedua jenis; kerugian moneter (kerusakan bangunan dan property lain yang dapat diperbaiki atau diganti), serta dampak non-moneter seperti hilangnya nyawa, dampak kesehatan, dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan seperti erosi pantai, dampak ekosistem dan dampak sosial.

Menurut BMKG, pengertian cuaca ekstrem adalah kejadian fenomena alam yang tidak normal dan tidak lazim yang ditandai oleh kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembapan udara, dan jarak pandang yang dapat mengakibatkan kerugian terutama keselamatan jiwa dan harta.

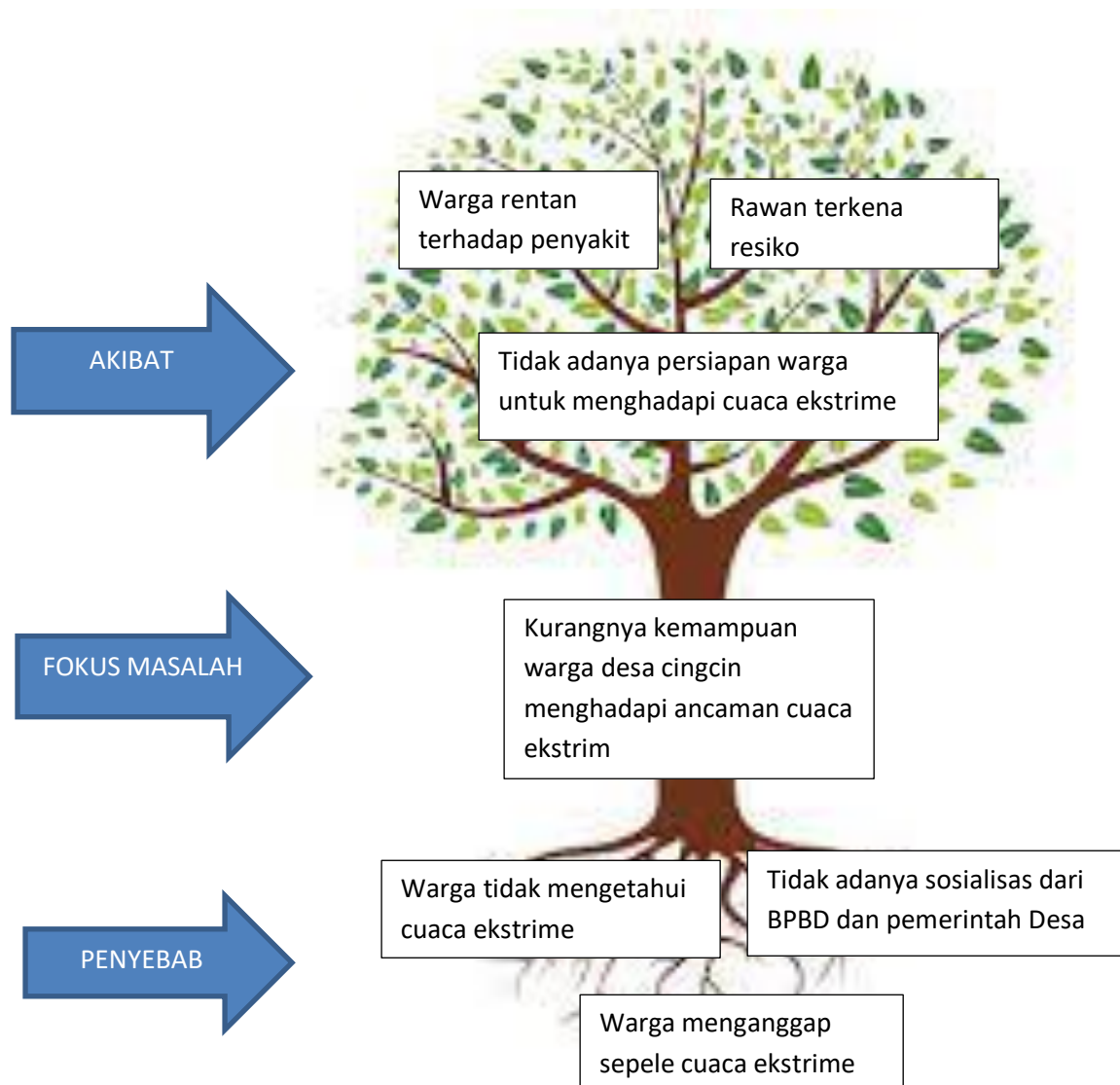
2.5.3 Assesmen

Dalam penyusunan asesmen, praktikan menggunakan metode desk review. Desk review merupakan salah satu metode dalam penelitian dengan melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh dari berbagai referensi dan kemudian dapat ditarik simpulan. Dalam menerapkan metode desk study praktikan menggunakan dua teknik untuk memudahkan analisis data, yaitu teknik penelitian kepustakaan dan teknik analisis pohon masalah.

a. Identifikasi Masalah

Soreang adalah ibukota Kabupaten Bandung yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Bandung setelah pemindahan dari Kota Bandung dan Baleendah. Soreang juga merupakan sebuah wilayah kecamatan yang terletak di Tatar Pasundan, Kabupaten Bandung, provinsi Jawa Barat, Indonesia. Desa Cingcin merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, desa Cingcin memiliki 20 RW dan 93 RT yang dihuni kurang lebih 30.000 jiwa. Berdasarkan topografi wilayah desa cingcin berada di dekat wilayah pegunungan sehingga di desa cingcin sering kali terjadi cuaca yang tidak menentu atau bias dikatakan cuaca ekstrime. Menurut informasi yang praktikan dapatkan banyak warga desa cingcin yang tidak mengetahui dampak dari cuaca extrim sehingga warga cingcin menganggap bahwa cuaca extrim bukan hal ynag perlu di waspadi.

Dalam mengidentifikasi masalah praktikan menggunakan teknik Analisis Pohon Masalah, Analisa masalah mengenai isu, Kurang kesiapsiagaan masyarakat desa cingcin dalam menghadapi cuaca extrim. Pohon masalah dapat membantu untuk menganalisa permasalahan yang terjadi sehingga dapat mengetahui sebab akibat dan solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Batang pohon menggambarkan isu atau masalah yang sedang terjadi, sedangkan ranting pohon menggambarkan akibat dari sebab yang diilustrasikan oleh akar pohon



Gambar 10 Pohon Masalah Analis Penanggulangan Bencana

1. Penyebab Masalah

1) Warga tidak mengetahui cuaca exstrime

Warga tidak mengetahui bahwa itu adalah cuaca exstrime yang dapat berlangsung beberapa hari kedepan, mereka hanya berfikir ketika hujan dan angina itu terjadi seperti hujan pada biasanya yang terjadi tidak dengan waktu yang lama.

2) Tidak adanya sosialisas dari BPBD dan pemerintah Desa

Berdasarkan wawancara praktikan bersama BPBD kabupaten bandung yaitu kak Jidan, menurut beliau sosialisasi mengenai cuaca exstrime belum pernah di adakan di desa cingcin , baik itu oleh BPBD atau oleh pihak desa Cingcin itu sendiri.

3) Warga menganggap sepele cuaca ekstrime

Menurut bapak RT 01 RW 20 yaitu bapak anton beliau mengatakan banyak warga yang menganggap bahwa cuaca ekstrime yang terjadi itu tidak berdampak yang serius dan tidak membuat kerugian , tetapi faktanya ketika cuaca ekstrime itu terjadi banyak warga yang mengalami kerusakan pada rumahnya seperti genteng yang berterbangan, pagar yang roboh bahkan ada salah satu warga yang sempat rumahnya hampir roboh karena hujan dan angin yang terjadi pada saat itu

2. Dampak Masalah

1) Warga rentan terhadap penyakit

Banyak warga yang terdampak sakit karena terjadinya cuaca ekstrime yang berkepanjangan , bahkan sebagian besar warga mengalami seperti batuk, pilek, demam dll

2) Rawan terkena resiko

Banyak resiko ketika kita tidak memiliki kesiapsiagaan ketika terjadi cuaca ekstrime , contohnya seperti banyak genteng yang berterbangan ketika hujan terjadi, warga yang tiba tiba sakit, dan bahkan ada salah satu warga yang rumahnya hampir roboh karena hujan angin.

3) Tidak adanya persiapan warga untuk menghadapi cuaca ekstrime

Warga tidak memiliki persiapan untuk mencegah terjadinya resiko dari cuaca ekstrime seperti memperbaiki genteng atau memaku genteng agar tidak terbawa angin ketika hujan terjadi ,

3. Fokus Masalah

Di desa Cingcin pada sendiri cuaca ekstrime ini sering berafiliasi dengan eksistensi siklon (badai) tropis dan efek anomaly iklim, baik El Nino atau La Nina sehingga di desa cingcin sering terjadi hujan yang lebat sampai beberapa hari dan pada hari berikutnya terjadi panas hingga beberapa hari kedepannya , sehingga dari kejadian tersebut banyak sekali warga desa cingcin yang mengalami sakit seperti demam, batuk, pilek dsb. Namun masih banyak warga desa cingcin yang belum tau dan mengerti cara mengantisipasi atau mencegah agar mereka tidak sakit akibat adanya cuaca ekstrime , bahkan banyak juga warga yang tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah cuaca ekstrime mereka hanya berfikir bahwa itu adalah hal yang biasa saja. Menurut anggota BPBD kabupaten bandung yaitu kak Jidan sosialisasi mengenai cuaca ekstrime belum pernah dilaksanakan di desa cingcin, sehingga banyak warga yang tidak mengerti dampak dari cuaca ekstrime.

Berdasarkan hasil asesmen melalui studi dokumentasi dan wawancara, maka prioritas permasalahan yang dipilih adalah kurangnya kemampuan warga desa cingcin menghadapi ancaman cuaca ekstrim. Hal ini banyak mengakibatkan warga di desa cingcin terkena sakit karena mereka tidak ada pencegahan sebelum cuaca ekstrime itu terjadi bahkan banyak juga warga yang sempat kehilangan atau mengalami kerusakan pada saat cuaca ekstrime terjadi yaitu ketika hujan badai yang terjadi beberapa hari yang menyebabkan genteng dari rumah warga berterbangan kemana mana selain itu warga juga banyak yang

mengalami batuk pilek dan ada juga salah satu warga di RW 20 yang pada saat hujan badai terjadi hampir kehilangan rumahnya.

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan hasil identifikasi masalah maka dapat disimpulkan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat yaitu:

- 1) Sosialisasi terkait bahaya cuaca ekstrem bagi masyarakat
- 2) Pembentukan program mitigasi bencana cuaca ekstrem

c. Identifikasi Sistem Sumber

Sistem sumber dalam kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai potensi dan sumber yang dapat digunakan dalam usaha kesejahteraan sosial atau praktik pekerjaan sosial, selain itu sistem sumber pekerjaan sosial merupakan sesuatu yang memiliki nilai dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan serta memecahkan suatu masalah. Pincus dan Minahan (1973:4) mengklasifikasikan sistem sumber kesejahteraan sosial menjadi sistem sumber informal atau alamiah, sistem sumber formal, dan sistem sumber kemasyarakatan. Sistem sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pemecahan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sistem sumber informal

Sistem sumber informal merupakan sumber yang dapat memberikan bantuan yang berupa dukungan emosional dan afeksi, nasihat dan informasi serta pelayanan-pelayanan kongkret lainnya yang dalam penggunaannya tidak memerlukan adanya prosedur. Sistem sumber informal yang dimanfaatkan dalam upaya pemecahan permasalahan ini adalah:

a. Pekerja sosial

Pekerja sosial dalam permasalahan ini bertugas sebagai inisiator dalam pemecahan permasalahan kurangnya pengetahuan masyarakat desa Cingcin mengenai cuaca ekstrim. Pekerja sosial dapat berperan sebagai perencana program bersama dengan masyarakat dan stakeholder serta sebagai penghubung antara sistem sasaran dengan sistem sumber.

b. Pekerja sosial masyarakat

Pekerja sosial masyarakat dalam upaya permasalahan ini akan dilibatkan dalam pembentukan kelompok sadar bencana. Pelibatan pekerja sosial masyarakat karena pekerja sosial masyarakat lebih memiliki pengetahuan mengenai karakteristik masyarakat di desa Cingcin.

c. Pendamping Desa

Pendamping desa dalam permasalahan ini akan dilibatkan dalam kegiatan penyusunan rancangan program pengurangan risiko bencana. Pendamping desa kemudian memiliki tanggung jawab untuk

mendampingi desa dalam upaya pelaksanaan program desa sadar bencana.

2. Sistem sumber formal

Sistem sumber formal adalah keanggotannya di dalam suatu organisasi atau asosiasi formal yang dapat memberikan bantuan atau pelayanan secara langsung kepada anggotanya. Sumber ini dapat digunakan apabila orang itu telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh sumber tersebut. Adapun sistem sumber formal yang dimanfaatkan dalam upaya pemecahan permasalahan ini adalah:

1. Karang taruna

Karang taruna desa Cingcin akan dilibatkan sebagai anggota dari kelompok sadar bencana. Karang taruna selanjutnya akan menjadi salah satu sasaran pemberian pengetahuan tentang kebencanaan.

3. Sistem sumber kemasyarakatan

Sistem sumber kemasyarakatan merupakan sumber baik lembagalembaga pemerintah ataupun swasta yang dapat memberikan bantuan pada masyarakat umum. Sistem sumber kemasyarakatan yang dimanfaatkan dalam upaya pemecahan permasalahan ini adalah:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung

BPBD Kabupaten Bandung merupakan stakeholder utama dalam program pengurangan risiko bencana di wilayah desa Cingcin. Dalam upaya pemecahan permasalahan ini BPBD Kabupaten Bandung akan dilibatkan dalam kegiatan perancangan program pengurangan risiko bencana. BPBD Kabupaten Bandung juga akan dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi mengenai kebencanaan, terutama Cuaca ekstrim.

2. Pemerintah Desa Cingcin

Pemerintah desa Cingcin perlu untuk dilibatkan karena pemerintah desa merupakan otoritas yang kemudian akan menjalankan kegiatan program pengurangan risiko bencana di desa Cingcin.

3. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Desa Cingcin akan dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi tanggap darurat bencana kepada kelompok sadar bencana. TAGANA desa Cingcin juga akan dilibatkan dalam kegiatan perancangan program pengurangan risiko bencana.

2.5.4 Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Soreang adalah ibukota Kabupaten Bandung yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Bandung setelah pemindahan dari Kota Bandung dan Baleendah. Soreang juga merupakan sebuah wilayah kecamatan yang terletak di Tatar Pasundan, Kabupaten Bandung, provinsi Jawa Barat, Indonesia. Desa Cingcin merupakan salah

salah satu desa yang berada di kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, desa Cingcin memiliki 20 RW dan 93 RT yang dihuni kurang lebih 30.000 jiwa. Berdasarkan topografi wilayah desa cingcin berada di dekat wilayah pegunungan sehingga di desa cingcin sering kali terjadi cuaca yang tidak menentu atau bias dikatakan cuaca ekstrim. Menurut informasi yang praktikan dapatkan banyak warga desa cingcin yang tidak mengetahui dampak dari cuaca ekstrim sehingga warga cingcin menganggap bahwa cuaca ekstrim bukan hal yang perlu di waspadai.

Di desa Cingcin pada sendiri cuaca ekstrim ini sering berafiliasi dengan eksistensi siklon (badai) tropis dan efek anomaly iklim, baik El Nino atau La Nina sehingga di desa cingcin sering terjadi hujan yang lebat sampai beberapa hari dan pada hari berikutnya terjadi panas hingga beberapa hari kedepannya, sehingga dari kejadian tersebut banyak sekali warga desa cingcin yang mengalami sakit seperti demam, batuk, pilek dsb. Namun masih banyak warga desa cingcin yang belum tau dan mengerti cara mengantisipasi atau mencegah agar mereka tidak sakit akibat adanya cuaca ekstrim, bahkan banyak juga warga yang tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah cuaca ekstrim mereka hanya berfikir bahwa itu adalah hal yang biasa saja.

Menurut anggota BPBD kabupaten bandung yaitu kak Jidan sosialisasi mengenai cuaca ekstrim belum pernah dilaksanakan di desa cingcin, sehingga banyak warga yang tidak mengerti dampak dari cuaca ekstrim.

Lalu menurut kasi kesra desa Cingcin yaitu bapak Adit beliau juga mengatakan hal yang sama seperti yang di katakana oleh kak Jidan, sempat juga beberapa warga mengeluhkan hal tersebut karena mereka yang terdampak sakit secara tiba tiba dan mereka bingung sakit itu karna apa dan mereka tidak mengetahui cara untuk mengantisipasi agar mereka tidak terdampak sakit karena adanya cuaca ekstrim

b. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

1) Tujuan Umum

Tujuan umum dari Program waspada cuaca ekstrim adalah untuk mencapai kesiapsiagaan masyarakat desa cingcin dalam menghadapi ancaman cuaca ekstrim yang terjadi secara tiba tiba

2) Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari Program waspada cuaca ekstrim di desa Cingcin adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan upaya pengurangan risiko cuaca ekstrim
- b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai cuaca ekstrim
- c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai tanggap darurat cuaca ekstrim

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Dalam rencana pemecahan masalah ini akan berfokus pada waspada cuaca ekstrem di desa Cingcin yang di dalamnya terdapat beberapa kegiatan sebagai berikut:

1) Upaya pengurangan risiko yang diakibatkan dari Cuaca ekstrime

Kegiatan perencanaan upaya pengurangan risiko bencana merupakan kegiatan penyusunan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana di desa Cingcin tepat nya pada pengurangan resiko dari cuaca ekstrime. Dalam kegiatan ini akan disampaikan mengenai konsep pencegahan cuaca ekstrime kepada peserta, kemudian disampaikan pula mengenai potensi dan kerentanan yang terdapat di desa Cingcin terkait dengan cuaca ekstrime, serta kegiatan penyusunan rencana upaya pengurangan risiko. Kegiatan perencanaan upaya pengurangan risiko cuaca ekstrime akan melibatkan beberapa pihak, seperti perwakilan masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pendamping desa, TAGANA, dan BPBD Kabupaten Bandung. Semua perwakilan desa selanjutnya bertanggung jawab untuk menyampaikan materi mengenai cuaca ekstrime kepada masyarakat desa serta membentuk kelompok desa sadar bencana. Kegiatan perencanaan ini merupakan kegiatan awal yang memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko cuaca ekstrime.

2) Pembentukan kelompok desa sadar bencana

Pembentukan kelompok desa sadar bencana dimaksudkan sebagai kepanjangan tangan dari BPBD dan TAGANA Kabupaten Bandung. Kegiatan pembentukan kelompok desa sadar bencana ini menjadi tanggung jawab bersama warga desa Cingcin. Kelompok desa sadar bencana akan terdiri dari perwakilan pemerintah desa, perwakilan masyarakat, dan karang taruna. Kelompok-kelompok desa sadar bencana ini kemudian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pengurangan risiko dan tanggap darurat bencana di desa Cingcin.

3) Simulasi Tanggap Bencana

Pelaksanaan simulasi tanggap darurat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh warga desa Cingcin agar dapat melakukan tindakan yang pas dan sesuai ketika bencana cuaca ekstrem terjadi di desa cingcin.

d. Sistem Partisipan

Tabel 2. 19 Sistem Partisipan Analisis Penanggulangan Bencana

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	Inisiator system	Pekerja sosial
2.	Change of system	1. Pekerja sosial 2. BPBD kabupaten Bandung
3.	Client system	Warga deasa Cingcin
4.	SuppoRT sistem	1. Pemerintah desa Cingcin 2. BPBD Kab. Bandung
5.	Controlling sistem	BPBD kabupaten Bandung
6.	Implementating system	1. Pekerja sosial 2. BPBD
7.	Target system	Warga desa Cingcin
8.	Action system	1.BPBD kab Bandung 2.Anggota Desa sadar bencana 3. Pekerja sosial

e. Metode dan Teknik

Metode yang akan digunakan dalam Program waspada cuaca ekstrim di desa Cingcin adalah dengan metode *community organization and community development* atau pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Kemudian diimplementasikan dengan menggunakan strategi kolaborasi dan kampanye. Strategi kolaborasi dapat terlaksana apabila setiap sistem menyetujui perubahan dan mendukung penggunaan sumber sumber secara bersama dan berfokus pada pencapaian win-win solution. Strategi kolaborasi tersebut didukung dengan penerapan taktik capacity building. Peningkatan kemampuan (capacity building) yang dapat dilakukan dengan teknik perluasan partisipasi atau pemberdayaan kelompok-kelompok yang memerlukan peningkatan kemampuan. Strategi kampanye tersebut didukung dengan penerapan taktik pendidikan dan pelatihan mengenai tanggap darurat cuaca ekstrim di desa Cingcin.

Dalam pelaksanaan kegiatan juga akan menggunakan teknik Focus Group Discussion. Penggunaan teknik FGD ini akan memungkinkan pencapaian tujuan dilakukannya diskusi. FGD ini akan dilakukan dalam kegiatan perencanaan upaya pengurangan risiko cuaca ekstrim.

f. Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

1) Alat

LCD, Layar, Ruang Pertemuan, Kursi, Alat Tulis dan Laptop

2) Rencana Anggaran Biaya

Tabel 2. 20 RAB Analis Penanggulangan Bencana

No	Jenis kegiatan	Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah
1.	Logistik				
	a. ATK	1	Pack	200.000	200.000
	b. Spanduk	1	Buah	150.000	150.000
	c. Banner	1	Buah	150.000	150.000
	d. Undangan	31	Lembar	500	15.500
2.	Honorium				
	a. BPBD kab Bandung	2	Orang	200.000	400.000
	b. Tagana	2	Orang	200.000	400.000
	c. Karang taruna	2	Orang	100.000	200.000
	d. Pekerja sosial	2	Orang	100.000	200.000
3.	Konsumsi				
	a. Snack peserta	25	pax	5000	125.000
	b. Snack narasumber	6	pax	5000	30.000
	c. snack panitia	7	pax	5000	35.000
4.	Transport				
	Narasumber	4	Orang	100.000	400.000
	TOTAL				2.305.500

g. Analisis Kelayakan Program

Tabel 2. 21 Analisis SWOT Analisis Penanggulangan Bencana

F.Eks F. I	Opportunity 1. Adanya adukungan dari stakeholder 2. Program sesuai dengan yang telah di rencanakan oleh stakeholder	Threats 1. Jumlah system sasaran yang besar
Strength 1. Melibatkan stakeholder terkait 2. Pelatihan dibantu oleh pemateri yang lebih mengerti 3. Memiliki landasan hokum	Strategi SO 1. Melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait Untuk meningkatkan manfaat dan kemudahan bagi program 2. Merencanakan dan mendiskusikan kembali bersama stakeholder	Strategi ST 1. Memonitoring kegiatan 2. Membentuk kelompok desa sadar bencana
Weakness 1. Kesadaran masyarakat masih belum muncul 2. Kegiatan bersifat berjenjang	Strategi WO 1. Memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa kegiatan ini penting 2. Melaksanakan monitoring program	Strategi WT 1. Memberikan pemahaman dan membuat sosialisasi yang menarik sehingga masyarakat memiliki rasa ingin tau yang lebih dan mereka mau mengikuti kegiatan dengan hikmat

Indikator Keberhasilan :

1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai cara pencegahan penyakit yang di sebabkan oleh cuaca exstrime
2. Terbentuknya desa sadar bencana di desa cingcin

h. Jadwal dan langkah langkah

1) Jadwal

Program penyelesaian masalah	Tujuan	Sasaran	Penanggung jawab pelaksanaan	pelaksana	Jadwal kerja	Sumber biaya
Penyuluhan bahaya cuaca ekstrem	Untuk meningkatkan pemahaman mengenai bahaya cuaca ekstrem dan dampaknya	Warga desa cingcin	Pekerja sosial	Pihak BPBD	1 hari	Desa cingcin
Pembentukan kelompok sadar bencana	Membentuk kelompok sadar bencana yang berasal dari masyarakat sekitar	Warga desa cingcin	Pekerja sosial	Pekerja sosial	1 hari	Desa cingcin
Monitoring dan evaluasi	Melihat perubahan pada masyarakat	Warga desa cingcin RW 20	Pihak desa	Pekerja sosia	2 minggu	Desa cingcin

2) Langkah langkah

a) Pra Pelaksanaan

1. Identifikasi sasaran kegiatan
Praktikan mengidentifikasi sasaran kegiatan penyuluhan bahaya cuaca ekstrem dan pembentukan kelompok sadar bencana.
2. Identifikasi Stakeholder
Stakeholder dapat diartikan sebagai pemangku kepentingan, dalam hal ini praktikan mengidentifikasikan stakeholder yang akan terlibat dalam pelaksanaan penyuluhan yaitu RT,RW, Pihak Desa dan Puskesmas.
3. Penyiapan Materi
Materi yang akan disampaikan adalah :
 - 1) Bahaya cuaca ekstrem
 - 2) Strategi menghadapi cuaca ekstrem
4. Penetaan Narasumber
Narasumber dalam Kegiatan penyuluhan ini adalah BPBD dan TAGANA.

5. Penyiapan Lokasi Kegiatan

Kegiatan Penyuluhan akan dilaksanakan di Aula desa Cingcin

b) Pelaksanaan

Kegiatan Penyuluhan bahaya cuaca ekstrem dilakukan dalam satu hari dengan dua sesi. Sesi pertama memberikan penyuluhan mengenai bahaya cuaca ekstrem. Kemudian pada sesi dua membahas strategi menghadapi cuaca ekstrem.

Tabel 2. 22 Rundown Acara Analis Penanggulangan Bencana

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana
1.	Pembukaan	09.00-09.10	MC
2.	Sambutan	09.10-09.30	Kepala Desa
3.	Pemaparan mareri 1	09.30-10.00	BPBD
4.	Pemaparan materi 2	10.00-10.30	TAGANA
5.	Sesi tanya jawab	10.30-10.45	Peserta
6.	Diskusi	10.45-11.10	Peserta
7.	Dokumentasi	11.10-11.20	Semua yang hadir
8.	Penutup	11.20-11.30	MC

c) Pasca Pelaksanaan

- 1) Monitoring kepada warga Desa Cingcin yang akan dilaksanakan oleh kepala desa.
- 2) Menyusun Laporan

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Kegiatan praktikum Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang telah terlaksana yaitu Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana. Dari pelaksanaan kegiatan praktikum ini, mahasiswa memperoleh pengalaman praktik dengan pengumpulan data melalui data sekunder di Desa Cingcin. Pengumpulan data tersebut mahasiswa lakukan ketika mencari data terkait isu-isu profil lulusan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.

1. Analis Jaminan Sosial

Dalam profil Analis Jaminan Sosial, praktikan memilih isu masalah masalah mengenai belum tepatnya pemanfaatan dana KIP oleh penerima manfaat di Desa Cingcin. Dalam upaya pemecahan masalah ini, praktikan merumuskan rencana intervensi melalui program “Penyuluhan Sosial mengenai Penggunaan Dana Bantuan Sosial Kartu Indonesia Pintar di Desa Cingcin”.

2. Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

Dalam profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, praktikan memilih isu mengenai peserta yang sudah terdaftar bantuan Rutilahu menolak. Dalam upaya pemecahan permasalahan ini, praktikan merumuskan rencana intervensi melalui “Sosialisasi Program Rutilahu”.

3. Analis Pemberdayaan Sosial

Dalam profil Analis Pemberdayaan Sosial, praktikan memilih isu penghasilan PRSE tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dalam upaya pemecahan masalah tersebut, praktikan merumuskan rencana intervensi melalui “Pelatihan Menjahit bersama PRSE di Desa Cingcin”.

4. Analis Penataan Lingkungan Sosial

Dalam profil Analis Penataan Lingkungan Sosial, praktikan memilih isu mengenai peningkatan kasus stunting akibat permasalahan isu lingkungan. Dalam upaya pemecahan masalah ini, praktikan merumuskan rencana intervensi melalui program “Masyarakat Sadar PHBS, Cegah Stunting”.

5. Analis Penanggulangan Bencana

Dalam profil Analis Penanggulangan Bencana, praktikan memilih isu mengenai kurangnya kesiapsiagaan masyarakat Desa Cingcin dalam menghadapi cuaca ekstrem. Dalam upaya pemecahan masalah ini,

praktikan merumuskan rencana intervensi melalui program “Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Sadar Bahaya Cuaca Ekstrem”.

Secara garis besar, manfaat lain yang mahasiswa dapatkan dari kegiatan praktikum ini yaitu kemampuan menganalisis masalah yang dimiliki mahasiswa meningkat. Mahasiswa juga mendapat pengetahuan-pengetahuan baru terkait profil lulusan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang belum di dapat di bangku perkuliahan.

B. Saran

1. Untuk Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
 - a. Diharapkan dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan lulusan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial agar pengalaman dan keterampilan mahasiswa dapat lebih berkembang.
 - b. Mengundang narasumber yang ekspert di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial agar mahasiswa mengetahui peluang kerja yang sesuai dengan lulusan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
 - c. Memberikan supervisi yang mampu membangun pemahaman dan kompetensi mahasiswa dalam praktiknya di lapangan.
2. Untuk Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
 - a. Mendukung mahasiswa dalam aktif di lapangan dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.
 - b. Dimohon untuk tidak terlalu mendadak dalam memberikan informasi mengenai praktikum yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. N., Marwanti, T. M., & Haryani, A. (2019). Keterampilan Sosial di kalangan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi: Satu Kajian di Kota Bandung, Indonesia. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 4(3), 128-139.
- Aziz, A. R. (2019). Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No 07 Tahun 2014 tentang Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Masyarakat Miskin di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 4(2).
- Ekstrem, C., Arsjad, A. B. S. M., & Riadi, B. (2013). Potensi Risiko Bencana Alam Longsor Terkait Cuaca Ekstrem di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
- Fadilah, R. (2021). Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai. *Jurnal El-Thawalib*, 2(3), 167-179.
- Kristianto, A., Saragih, I. J. A., Ryan, M., Wandarana, W., Pratiwi, H. N., Gaol, A. L., ... & Siadari, E. L. (2018). Pemanfaatan Data Pengamatan Cuaca Berbasis Data Penginderaan Jauh Dan Model Cuaca Numerik Untuk Prakiraan Cuaca Dalam Mengurangi Risiko Bencana Hidrometeorologi. *Jurnal Geografi, Edukasi Dan Lingkungan (JGEL)*, 2(1), 22-31.
- Muharam, R. S., & Rusli, B. (2019). Implementasi Program Rumah Tidak Layak huni (Rutilahu) di Kabupaten Bandung. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 3(1).
- Priyono, P. (2020). Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan (Studi Kasus Pendampingan Aksi Cegah Stunting di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Good Governance*.
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 2(1), 193-204.
- Setyawati, S. (2018). *Efektivitas program Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap (Studi Permendikbud No. 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar)* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
- Simamora, Y. A., Yuliani, D., & Wardhani, D. T. (2019). Hardiness Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Di

Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial (Lindayasos)*, 1(2).

Sutraningsih, W., Marlindawani, J., & Silitonga, E. (2021). Implementasi Strategi Pelaksanaan Pencegahan Stunting di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 7(1), 49-67.

Tursilarini, T. Y., & Udiati, T. (2020). Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Bangka. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 44(1), 1-21.

Wijaya, A. (2022). *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. Sinar Grafika.

Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972-1977*. New York: Pantheon Books

LAMPIRAN



Gambar 11 Bimbingan Akhir Laporan



*Gambar 12 Bimbingan Akhir sebelum
Persidangan*



Gambar 13 Lokakarya hasil praktikum



Gambar 14 Lokakarya



Gambar 15 Tim Desa Cingcin



*Gambar 16 Bimbingan
Praktikum*